



**RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026**



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

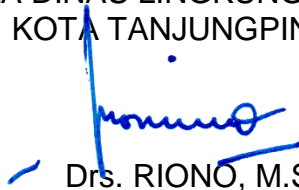
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah- Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam urusan penunjang pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Tujuan utama dari penyusunan Renstra DLH Kota Tanjungpinang ini adalah untuk menyelaraskan antara perencanaan pembangunan di tingkat Kota dengan rencana program dan kegiatan di tingkat Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan yang dilakukan haruslah mendukung tercapainya sasaran dan tujuan pada RPD yang akan menyelesaikan permasalahan masyarakat di tingkat Kota. Oleh karena itu, Dokumen Renstra ini harus menjadi pedoman bagi seluruh personel DLH Kota Tanjungpinang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan urusan lingkungan hidup.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Semoga dokumen Renstra yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tanjungpinang, Juni 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG


Drs. RIONO, M.Si
NIP. 196704161994011001



DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 LANDASAN HUKUM..... | 3 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN | 8 |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN | 9 |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 11 |
| 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | 11 |
| 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH..... | 32 |
| 2.2.1 KEPEGAWAIAN..... | 32 |
| 2.2.2 SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG..... | 34 |
| 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 80 |
| 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 83 |
| BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD | 86 |
| 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... | 86 |
| 3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA..... | 88 |
| 3.2.1 TELAAHAN RENSTRA K/L | 88 |
| 3.2.2 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 95 |
| 3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS | 99 |
| 3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS | 122 |
| BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN | 127 |
| 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH | 127 |



| | |
|--|-----|
| 4.2. HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPD | 130 |
| BAB VI, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 138 |
| BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 158 |
| BAB VIII. PENUTUP | 167 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------------|---|----|
| Tabel 2. 1 | Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup | 32 |
| Tabel 2. 2 | Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan | 33 |
| Tabel 2. 3 | Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup | 33 |
| Tabel 2. 4 | Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup | 33 |
| Tabel 2. 5 | Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Struktur Organisasi..... | 34 |
| Tabel 2. 6 | Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Lingkungan Hidup | 35 |
| Tabel 2. 7 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup | 81 |
| Tabel 2. 8 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang | 82 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------------|--|----|
| Gambar 1. 1 | Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup | 31 |
|--------------------|--|----|



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen



Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Wali Kota Kota Tanjungpinang yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026 disusun sebagai acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, terwujud sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat kota dengan perangkat daerah serta antara dokumen perencanaan lima tahunan dengan dokumen tahunan. Pada



tahap yang lebih operasional Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup akan diacu dan dipedomani dalam penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD) Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2024-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 280);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 2);



31. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup di Kota Tanjungpinang secara sinergis. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan bidang lingkungan hidup, guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup tahunan selama tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan penjabaran visi misi Wali Kota ke dalam perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup, yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan khususnya di bidang lingkungan hidup untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2026;
2. Menjamin keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah bidang sosial mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup;



4. Sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam penyusunan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam Renja Kerja dinas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2014-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan KegutananProvinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan



jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tahun 2022 berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup; Serta Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang lingkungan hidup;
- b. Memimpin, mengkoordinir, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Menyiapkan, Menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas Dinas;
- d. Menjalin Kerjasama/mengkoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;



- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhibungan dengan tugas Dinas;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasian seluruh fingsi Dinas; dan
- g. Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penataan usaha keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekjratiatan Dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventarisasi;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- e. Pelaksnaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian peyusunan perencanaan, evaluasi pelaporan kegiatan Dinas; dan
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Pelaporan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan



- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas Sekretariat urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan:
 1. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 2. Penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring program kerja Dinas;
 4. Pengkoordinasikan internal dalam penyusunan program kerja Dinas;
 5. Pembuatan laporan kegiatan program kerja tahunan; dan
 6. Penyiapan penyusunan LAKIP, E-SAKIP, serta laporan tahunan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan umum dan kepegawaian:
 1. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kersipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 3. Pelaksanaan administrasi kepegawainya yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 4. Pelaksanaan pengelolaan aset/barang dinas baik bergerak maupun tidak bergerak; dan
 5. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.



c. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan keuangan:

1. Penyusunan dan pengawasan laporan keuangan;
2. Penyusunan dan pengelolaan anggaran rutin meliputi pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
3. Pemeliharaan dan penyimpanan surat yang berkaitan dengan keuangan; dan
4. Pelayanan administrasi keuangan, permintaan gaji berkala dan pembayaran gaji tunjangan dan honor pegawai.

3. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Tata Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Tata lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;



- l. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- n. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- o. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan KLHS, pemantauan dan evaluasi KLHS;
- p. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- q. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- r. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- s. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- u. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- v. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- w. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- x. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Bidang Tata lingkungan terdiri dari tiga seksi :

- a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup



1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS melaksanakan tugas:
 - a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. Pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. Penyusunan NSDA dan LH;
 - j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
 - q. Pemantauan dan evaluasi KLHS.
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan tugas:
 - a. Penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);



- b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL); dan
- c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas:

- a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

4. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;



- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- j. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- k. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- l. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- m. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- n. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- o. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- p. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- q. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- r. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.



Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 terdiri dari tiga seksi :

- a. Seksi Pengurangan Sampah
 - b. Seksi Limbah B3
 - c. Seksi Penanganan Sampah
-
- a. Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas:
 1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
 2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
 8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
 - b. Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas:
 1. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 2. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 3. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 4. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 5. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;



6. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
7. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
8. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
9. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

c. Seksi Penanganan Sampah melaksanakan tugas :

1. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
3. Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
4. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
5. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA Sampah;
6. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir;
7. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
8. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan pihak swasta;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

5. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk



melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- e. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumberpencemar institusi dan non institusi;
- g. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- i. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- j. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumberpencemar institusi dan non institusi;
- k. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- p. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.



Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup mempunyai tiga seksi terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan
- b. Seksi Pencemaran lingkungan
- c. Seksi Kerusakan Lingkungan

1. Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas:
 - a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - c. Penentuan baku mutu lingkungan; dan
 - d. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
2. Seksi Pencemaran lingkungan melaksanakan tugas:
 - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - c. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - e. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - f. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan



- h. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- 3. Seksi Kerusakan Lingkungan yang melaksanakan tugas:
 - a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.

6. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



- i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;



- v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ii. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup mempunyai tiga seksi terdiri dari:



- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - b. Seksi Penegakan Hukum lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
-
1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan tugas:
 - a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan; dan
 - h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 2. Seksi Penegakan Hukum lingkungan, melaksanakan tugas:
 - a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;



- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - f. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH;
 - g. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - h. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas:
- a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



- g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. Pemberian dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

UPTD TPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pengelolaan Sampah. UPTD TPA mempunyai fungsi:



- a. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- b. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- c. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan, dan pengangkutan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, *recycle*, Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pemantau dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- e. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, *recycle* Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi UPTD, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kepala UPTD mempunyai tugas :
- Memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis di bidang Pemrosesan Akhir Sampah;
 - Mengawasi dan melaksanakan pelaporan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas



- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - Menyusun perencanaan dan kegiatan unit pelaksanaan Teknis Dinas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

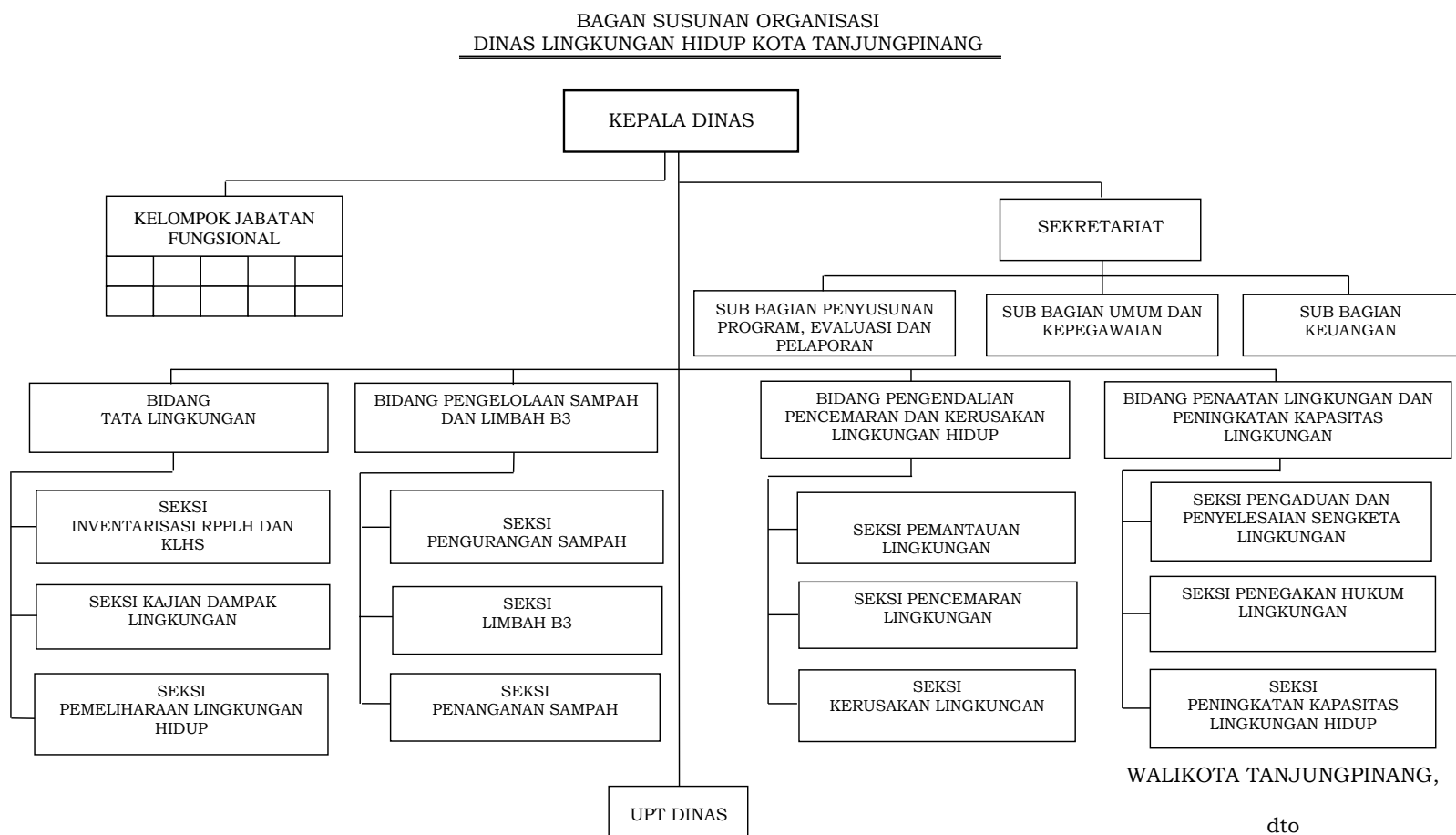
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang yang telah diubah dengan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang
Jl. Daeng Celak Gedung A Lantai 1-2 Senggarang

RAHMA



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 KEPEGAWAIAN

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang didukung oleh pegawai sebanyak 423 orang (data per Januari 2023), dengan rincian di bawah ini.

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

| JABATAN | JUMLAH | |
|--------------------------------|------------|--------------|
| PNS | | |
| Kepala Dinas | 1 | Orang |
| Sekretaris Dinas | 1 | Orang |
| Kepala Bidang | 4 | Orang |
| Kepala Sub Bagian | 3 | Orang |
| Jabatan Fungsional | 13 | Orang |
| Kepala UPTD TPA | 1 | Orang |
| Staf | 35 | Orang |
| TOTAL | 58 | Orang |
| | | |
| Non PNS | | |
| PTT | 29 | Orang |
| Tenaga Kantor | 6 | Orang |
| <i>Cleaning Service</i> | 2 | Orang |
| Satpam | 1 | Orang |
| Tenaga Kebersihan | 327 | Orang |
| TOTAL | 365 | Orang |
| TOTAL PNS & NON PNS | 423 | Orang |



Tabel 2. 2 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan

| GOLONGAN | JUMLAH |
|--------------|-----------------|
| IV | 7 Orang |
| III | 30 Orang |
| II | 20 Orang |
| I | 1 Orang |
| TOTAL | 58 Orang |

Tabel 2. 3 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Eselon

| ESELON | JUMLAH |
|--------------|-----------------|
| I | - Orang |
| II | 1 Orang |
| III | 5 Orang |
| IV | 4 Orang |
| JFT | 13 Orang |
| Staf | 35 Orang |
| TOTAL | 58 Orang |

Tabel 2. 4 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Pendidikan

| PENDIDIKAN | JUMLAH | PERSEN |
|--------------|-----------------|--------|
| S2 | 5 Orang | 8.62 |
| S1 | 30 Orang | 51.72 |
| D4 | - Orang | 0.00 |
| D3 | 11 Orang | 18.97 |
| D2 | - Orang | 0.00 |
| SMA/SMK | 11 Orang | 18.97 |
| SMP | 1 Orang | 1.72 |
| TOTAL | 58 Orang | 100.00 |



Tabel 2. 5 Komposisi PNS Dinas Lingkungan Hidup
Berdasarkan Struktur Organisasi

| ORGANISASI | GOLONGAN | | | | NON PNS | JUMLAH |
|--------------------|----------|-----|----|---|---------|------------------|
| | IV | III | II | I | | |
| Kepala Dinas | 1 | | | | | 1 Orang |
| Sekretaris Dinas | 1 | | | | | 1 Orang |
| Kepala Bidang | 4 | | | | | 4 Orang |
| Kepala Sub Bagian | | 3 | | | | 3 Orang |
| Jabatan Fungsional | 1 | 12 | | | | 13 Orang |
| Kepala UPTD | | 1 | | | | 1 Orang |
| Staf PNS | | 14 | 20 | 1 | | 35 Orang |
| PTT | | | | | 29 | 29 Orang |
| Tenaga Kantor | | | | | 6 | 6 Orang |
| Cleaning Service | | | | | 2 | 2 Orang |
| Satpam | | | | | 1 | 1 Orang |
| Tenaga Kebersihan | | | | | 327 | 327 Orang |
| TOTAL | | | | | | 423 Orang |

2.2.2. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Secara rinci saran dan prasarana pendukung Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Lingkungan Hidup

1. Sarana dan Prasarana Kantor Berdasarkan KIB A

| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|---|-----------|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah | 14,000.00 | A | Tempat Pengolahan Sampah (TPA GANET) |
| 2 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah | 10,259.00 | A | Tempat Pengolahan Sampah (TPA GANET) Surat No. 175/590/VII/2005 |
| 3 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah | 29,900.00 | A | Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah |
| 4 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah | 11,375.00 | A | SHM AN. RESMININGSIH DKK NO. 00795 |
| 5 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah | 14,978.00 | A | SHM AN. PARDIYONO NO. 00869 |
| 6 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah | 19,800.00 | A | Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah |
| 7 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah | 10,171.00 | A | Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah |
| 8 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah | 7,915.00 | A | Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah |
| 9 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah | 8,559.00 | A | Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah |



| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|---|-----------|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah | 12,214.00 | A | Pembayaran Tanah, Bangunan, Tanaman, dan Masa tunggu untu SHM No. 6947 Pada Belanja Modal Pengadaan lahan TPA Ganet (Tahap 2) kegiatan Pembebasan/Ganti Ru Tanah untuk Pengembangan Perkotaan Tanjungpinang - TA 2019 No. SPM : 159/1.04.01/2019 da Pembay |
| 11 | Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah | 19,998.00 | A | Pembayaran Tanah, Bangunan, Tanaman, dan Masa tunggu untu SHM No. 6948 Pada Belanja Modal Pengadaan lahan TPA Ganet (Tahap 2) kegiatan Pembebasan/Ganti Ru Tanah untuk Pengembangan Perkotaan Tanjungpinang - TA 2019 No. SPM : 160/1.04.01/2019 da Pembay |



2. Sarana dan Prasarana Kantor Berdasarkan KIB B

| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|----|--|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bus (Penumpang 30 Orang Keatas) | Isuzu | B | Truck + Attachhment |
| 2 | Mobil Tinja | Toyota | B | Mobil Tinja |
| 3 | Mobil Tangki Air | Isuzu | B | Mobil Tangki |
| 4 | Mobil Tangki Air | Isuzu | B | Mobil Tangki |
| 5 | Lemari Kaca | Victor | B | Lemari Kaca |
| 6 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Joy | B | Meja Kerja Pejabat Eselon III |
| 7 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III | Victor | B | Kursi Kerja Pejabat Eselon III |
| 8 | Autoclave (Alat Laboratorium Umum) | - | B | Autoclave |
| 9 | Vehicle Emission Gas Analyzer | - | B | Alat Uji Emisi |
| 10 | Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) | Isuzu / KUNING (2499 cc) | B | Pick Up |
| 11 | Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) | Isuzu / KUNING (2499 cc) | B | Pick Up |
| 12 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | Joy | B | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV |
| 13 | Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/W alikota | Victor | B | Meja Kerja Pejabat Eselon IV |
| 14 | Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Menteri/Gubernur/Bupati/W alikota | Olimpic | B | Meja Kerja Pejabat Eselon IV |
| 15 | Sepeda Motor | Honda / Karisma | B | Sepeda Motor |
| 16 | Sepeda Motor | Honda / Kharisma 125 D | B | Sepeda Motor |
| 17 | Mobil Tinja | Isuzu | B | Mobil Tinja |
| 18 | Mobil Tinja | Isuzu | B | Mobil Tinja |
| 19 | Mobil Tinja | Honda / Kharisma 125 D | B | Mobil Tinja |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|----|--|--------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Wheel Loader + Attachment | WA 180-3 | B | Wheel Loader + Attachment |
| 21 | Mobil Tinja | Isuzu | B | Mobil Tinja |
| 22 | Truck Crane | Toyota | B | Truck Lift Crane |
| 23 | Transportabel Generating Set | - | B | Genset |
| 24 | Truck + Attachment | Isuzu / NKR 71 | B | Truck + Attachment (Armroll Truck) |
| 25 | Truck + Attachment | Isuzu / NKR 72 | B | Truck + Attachment (Armroll Truck) |
| 26 | Sepeda Motor | Suzuki / FD110XCSD | B | Sepeda Motor |
| 27 | Mobil Tinja | Suzuki / FD110XCSD | B | Mobil Tinja |
| 28 | Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi) | Olimpia | B | Mesin Tik Manual Longe Wagen |
| 29 | Truck + Attachment | Toyota / Hynoduro | B | Truck + Attachment (Armroll Truck) |
| 30 | alat ukur universal lainnya (dst) | - | B | Velo City Meter |
| 31 | alat ukur/pembanding lainnya (dst) | Yenaco | B | Cultura Mini Incubator |
| 32 | alat ukur lain-lain lainnya (dst) | TR 320 | B | Thermoreaktor |
| 33 | Lemari Kaca | rakitan | B | Lemari kaca |
| 34 | White Board | Sakana | B | White Board |
| 35 | Meja 1/2 Biro | - | B | Meja kerja |
| 36 | Facsimile | Panasonic | B | Faximile kx 342 |
| 37 | Slide Projector (Lapangan) | Infokus | B | Proyektor |
| 38 | Timbangan/Neraca | AdamPw254 | B | Timbangan Analitik |
| 39 | Crusible Penyaring | DW6647 | B | Incubator |
| 40 | alat laboratorium microbiologi lainnya (dst) | Denpo | B | Refrigerator |
| 41 | alat laboratorium microbiologi lainnya (dst) | Nova 400 | B | Spectroquant |
| 42 | alat laboratorium kimia lainnya (dst) | Nova 900 | B | Spectroquant |
| 43 | Water Current Meter (Peralatan Hidrologi) | wildco3907 | B | Water Sampler Horizontal |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|----|---|-------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Water Current Meter (Peralatan Hidrologi) | wildco1907 | B | Water Sampler Vertikal |
| 45 | Water Sample | - | B | Water Sampler |
| 46 | kendaraan bermotor khusus lainnya (dst) | Mitsubishi / Fuso | B | Mobil Boks/Laboratorium |
| 47 | Lemari Kayu | Rakitan | B | Lemari Arsip |
| 48 | Meja 1/2 Biro | HD / 50i Topix | B | Meja Tulis |
| 49 | A.C. Window | Sanyo | B | Air Conditioner/AC |
| 50 | Kursi Kerja Pejabat lainnya | Chairman Biru | B | Kursi Putar |
| 51 | Autoclave (Alat Laboratorium Umum) | - | B | Autoclave |
| 52 | alat laboratorium penunjang lainnya (dst) | - | B | WaterBath |
| 53 | Server | DEL | B | Komputer Selver |
| 54 | Truck + Attachment | HINO | B | Truck + Attachment (Armroll Truck) |
| 55 | kendaraan bermotor khusus lainnya (dst) | - | B | Alat Laboratorium |
| 56 | Meja 1/2 Biro | - | B | Meja Rapat |
| 57 | Stationary Generating Set | M9-Misaka | B | Mesin Generator |
| 58 | Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) | Toyota / HiLux | B | Angkutan Darat (Pick Up) |
| 59 | Truck + Attachment | Toyota / Dyno | B | Truck + Attachment (Armroll Truck) |
| 60 | Truck + Attachment | Toyota / Dyno | B | Truck + Attachment (Armroll Truck) |
| 61 | Lemari Kayu | - | B | Almari 3 Pintu |
| 62 | Meja 1/2 Biro | Victo | B | Meja Kerja 1/2 Biro |
| 63 | Kursi Rapat | Chairman | B | Kursi Rapat |
| 64 | Alat Pembersih lainnya | - | B | Tempat sampah 1000 unit |
| 65 | Alat Pembersih lainnya | - | B | Tempat sampah gantung 100 unit |
| 66 | Alat Pembersih lainnya | - | B | TPS Komunal 20 unit |
| 67 | Camera Video | Canon / EOS 550D | B | Camera Digital |
| 68 | Refractometer (Alat | - | B | Refraktor Meter |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|----|--|-----------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Laboratorium Umum) | | | |
| 69 | Burner | - | B | Burner Fame + Erlenmayer |
| 70 | Water Sampler (General Laboratory Tool) | - | B | Water Samping |
| 71 | Vehicle Emission Gas Analyzer | AVL / DIGAS 4000 Light | B | Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor Bahan Bakar Bensin |
| 72 | Vehicle Emission Gas Analyzer | AVL / Dismoke 4000 | B | Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor Bahan bakar Solar |
| 73 | Note Book | Vaio | B | Note Book |
| 74 | Buldozer | Carterpillar | B | Buldozer |
| 75 | Sepeda Motor | Honda / Supra X | B | Sepeda Motor |
| 76 | Mobil Tinja | TOYOTA DYNA / ARMROLL TRUCK | B | Mobil WC Kontainer |
| 77 | Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) | Kaisar | B | Gerobak Sampah Bermotor |
| 78 | Perahu Penyeberangan | - | B | Perahu Sampan Pompong |
| 79 | Container | - | B | TPS Kontainer |
| 80 | Bemo | Kaisar | B | Gerobak Sampah Bermotor |
| 81 | Mesin Ketik Manual Portabel (11-13 Inchi) | Olimpia | B | Mesin Tik Manual |
| 82 | Lemari Besi/Metal | - | B | Lemari Rakitan |
| 83 | Lemari Besi/Metal | - | B | Lemari Besi |
| 84 | Alat Kantor Lainnya | - | B | Baliho |
| 85 | Meja Kerja Kayu | - | B | Gerobak Sampah |
| 86 | Meja Kerja Kayu | - | B | Gerobak Sampah |
| 87 | Meja 1/2 Biro | - | B | Meja Kerja 1/2 Biro |
| 88 | Kursi Putar | Indachi | B | Kursi Kerja Putar |
| 89 | Kursi Putar | - | B | Kursi Kerja Putar |
| 90 | Sofa | - | B | Sofa |
| 91 | A.C. Window | Panasonic 1,5 PK | B | AC |
| 92 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | - | B | Meja Eselon II |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 93 | Reel Tape Duplicator | Cannon D5 | B | Camera |
| 94 | Layar Film/Projector | Sony | B | Proyektor |
| 95 | Unit Tranceiver VHF Portabel | Panasonic KX - FP701 | B | Faximili |
| 96 | Tabung Gas Ho | - | B | Tabung Kebakaran |
| 97 | Meja Kerja | Rakitan | B | Meja Kerja |
| 98 | P.C Unit | Acer / Acer | B | Komputer PC |
| 99 | Note Book | Sony Vaio | B | Note Book |
| 100 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Canon / MG30170 | B | Printer |
| 101 | Peralatan Personal Komputer lainnya | - | B | UPS / Stabilizer |
| 102 | Dump Truck | TOYOTA DYNA / 130 HT | B | DUMP TRUCK - EX BP 9106 T |
| 103 | Dump Truck | TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK | B | - |
| 104 | Dump Truck | TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK | B | - |
| 105 | Dump Truck | TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK | B | - |
| 106 | Dump Truck | TOYOTA DYNA / 130 HT | B | DUMP TRUCK |
| 107 | Dump Truck | TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK | B | - |
| 108 | Dump Truck | TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK | B | - |
| 109 | Dump Truck | TOYOTA DYNA / DUMP TRUCK | B | - |
| 110 | Dump Truck | TOYOTA | B | - |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--------------|---|-------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | DYNA / DUMP TRUCK | | |
| 111 | Dump Truck | TOYOTA DYNA / AMROLL | B | - |
| 112 | Dump Truck | TOYOTA DYNA / AMROLL | B | - |
| 113 | Dump Truck | TOYOTA DYNA / AMROLL | B | - |
| 114 | Dump Truck | TOYOTA DYNA / AMROLL | B | - |
| 115 | Pick Up | TOYOTA DYNA / HILUX 2.5 GDC4X4MT | B | PICK UP DOUBLE CABIN EX BP 8383 T |
| 116 | Sepeda Motor | HONDA VERZA / GL15B1DF M/T | B | - |
| 117 | Sepeda Motor | HONDA VERZA / GL15B1DF M/T | B | - |
| 118 | Sepeda Motor | HONDA VERZA / GL15B1DF M/T | B | - |
| 119 | Sepeda Motor | HONDA VERZA / GL15B1DF M/T | B | - |
| 120 | Sepeda Motor | HONDA VERZA / GL15B1DF M/T | B | - |
| 121 | Sepeda Motor | HONDA VERZA / GL15B1DF M/T | B | - |
| 122 | Motor Boat | Yamaha | B | - |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 123 | Global Positioning System | Garmin Oregon | B | Penambahan |
| 124 | Container | - | B | - |
| 125 | Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) | Brother | B | Penambahan |
| 126 | Lemari Besi/Metal | - | B | Penambahan |
| 127 | Lemari Kayu | Rakitan | B | Penambahan |
| 128 | Alat Kantor Lainnya | - | B | - |
| 129 | Meja 1/2 Biro | Orbitrend / 1/2 biro | B | Penambahan |
| 130 | Meja 1/2 Biro | Uno / 1 Biro | B | Penambahan |
| 131 | A.C. Split | Mitsubishi | B | Penambahan |
| 132 | A.C. Split | Mitsubishi | B | Penambahan |
| 133 | Camera Video | Nikon | B | Penambahan |
| 134 | P.C Unit | Acer | B | Penambahan |
| 135 | P.C Unit | Acer | B | Penambahan |
| 136 | Note Book | Sony Vaio | B | Penambahan |
| 137 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Canon / Fixma | B | Penambahan |
| 138 | Peralatan Personal Komputer lainnya | Ica | B | Penambahan |
| 139 | Server | - | B | Penambahan |
| 140 | Peralatan Jaringan lainnya | - | B | Penambahan |
| 141 | Dump Truck | TOYOTA / DYNA 130 HT | B | DUMP TRUCK (LORI SAMPAH) |
| 142 | Dump Truck | TOYOTA / DYNA 130 HT | B | DUMP TRUCK (LORI SAMPAH) |
| 143 | Dump Truck | TOYOTA / DYNA 130 HT | B | DUMP TRUCK (LORI SAMPAH) |
| 144 | Truck + Attachment | TOYOTA DYNA 130 HT / RANYANUM | B | Truck toilet portabel |
| 145 | Truck + Attachment | TOYOTA / DYNA 130 HT | B | Truck toilet portabel |
| 146 | Truck + Attachment | TOYOTA DYNA / | B | - |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ARMROLL TRUCK | | |
| 147 | Truck + Attachment | TOYOTA DYNA / ARMROLL TRUCK | B | - |
| 148 | Mobil Tinja | TOYOTA / DYNA 130 HT | B | TRUCK TANGKI AIR |
| 149 | Mobil Tinja | TOYOTA / DYNA 130 HT | B | TRUCK TANGKI AIR |
| 150 | Mesin Kompresor | - | B | Mesin kompresor angin |
| 151 | Mesin Penghalus | - | B | MESIN PENCACAH PLASTIK |
| 152 | Mesin Penghalus | - | B | MESIN PENGAYAK SAMPAH |
| 153 | Alat Prosesing lainnya | - | B | GAS METAN |
| 154 | Lemari Besi/Metal | - | B | - |
| 155 | Brandkas | ICHIBAN | B | - |
| 156 | Alat Kantor Lainnya | DAITO / DG 6700 | B | - |
| 157 | Alat Kantor Lainnya | - | B | TONG SAMPAH KONTEMPORER |
| 158 | Alat Kantor Lainnya | - | B | TPS KOMUNAL |
| 159 | Alat Kantor Lainnya | - | B | TPS KONTAINER |
| 160 | Alat Kantor Lainnya | - | B | TERPAL PENUTUP DUMPTRUCK |
| 161 | Alat Kantor Lainnya | - | B | TERPAL PENUTUP DUMPTRUCK |
| 162 | Meja 1/2 Biro | ORBIT | B | - |
| 163 | Meja 1/2 Biro | ORBIT | B | - |
| 164 | Alat Pembantu Kebakaran | OL-10 FL | B | Lampu sorot portabel |
| 165 | Alat Pembantu Kebakaran | - | B | Tabung pemadan kebakaran |
| 166 | recorder display lainnya (dst) | CANON / MG 2500 | B | - |
| 167 | P.C Unit | LENOVO | B | - |
| 168 | Peralatan Personal Komputer lainnya | POWER FREE / S650BX | B | - |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|------------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 169 | Air Conditioning (AC) | Mitsubishi | B | - |
| 170 | Kapal Motor | - | B | MESIN MOTOR BOT/MOTOR TEMPEL (15 PK) |
| 171 | Alat Laboratorium lainnya | - | B | ALAT LABORATORIUM UNTUK PEMERIKSAAN AIR LINDI DAN UDARA |
| 172 | Lemari Besi/Metal | WILLY / 4BAYS WSI- 8HC | B | LEMARI ARSIP BESI 4 PINTU |
| 173 | Lemari Besi/Metal | CNY / FY - 625 | B | LEMARI BESI 2 PINTU FULL KACA |
| 174 | Lemari Besi/Metal | CNY / FY - 625 | B | LEMARI BESI 2 PINTU FULL KACA |
| 175 | Alat Penghancur Kertas | SECURE / Maxi 24sc | B | Alat Penghancur kertas |
| 176 | Mesin Absensi | Netgen / NAC-5000 | B | Mesin Absensi |
| 177 | Alat Kantor Lainnya | - | B | TPS KOMUNAL |
| 178 | Wireless | AK AUDIO PROFESION AL | B | WIRELESS |
| 179 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | CANON / IP 2770 | B | PRINTER |
| 180 | Mesin Bor Tanah | Multitech | B | Mesin Bor tanah |
| 181 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | Uno Harmony / UOD5076 | B | Meja Besar Eselon IV |
| 182 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Indachi / D- 821 | B | Kursi Kerja Pejabat Eselon III |
| 183 | P.C Unit | Lenovo | B | Komputer PC |
| 184 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | epson / lq- 310 plus | B | Printer Epson |
| 185 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | HP Laserjet / CP 1025 | B | Printer Laserjet CP 1025 |
| 186 | Air Conditioning (AC) | Samsung | B | AC |
| 187 | Pompa lainnya (dst) | - | B | Aerator TPA Ganet (SPM Nomor 341/1.04.01/2017) |
| 188 | Tandu dorong | - | B | Bak Kontainer Sampah |
| 189 | Papan Pengumuman | - | B | Papan Plang |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|--|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Kebersihan (SP2D Nomor 09641/SP2D/2017) |
| 190 | Mesin Cuci | Westco / GX160 | B | Mesin Cuci Kendaraan |
| 191 | Alat Pembersih lainnya | - | B | Alat Mesin Fogging |
| 192 | Dump Truck | HINO / WU342R-HKMR HD3 | B | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Sampah Dumb Truck (DAK) - TA 2019 No. SPM : 158/1.04.01/2019 (Truck Warna Hijau DUTRO 110 HD Th. Pembuatan 2019) |
| 193 | Dump Truck | HINO / WU342R-HKMR HD3 | B | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Sampah Dumb Truck (DAK) - TA 2019 No. SPM : 158/1.04.01/2019 (Truck Warna Hijau DUTRO 110 HD Th. Pembuatan 2019) |
| 194 | Sepeda Motor | Aerox 155 VVA SVersion Vin 2019 / 73161600 KDR 4772257 | B | Kendaraan Roda Dua TA.2019 |
| 195 | Mobil Tinja | HINO / WU342R-HKMR HD3 | B | Belanja Modal Pengadaan Truck Tinja (DAK) (Truck Warna Hijau DUTRO 110 HD Thn Pembuatan 2019) - TA 2109 SPM No : 180, SP2D No : |
| 196 | Kendaraan tak bermotor penumpang lainnya (dst) | BECAK | B | Pengadaan Becak Pengangkut Sampah - TA 2019 SPM No : 226, SP2D No : |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|---------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 197 | Perkakas bengkel listrik lainnya (dst) | KRISBOW | B | Belanja Pengadaan Makanik Tool Set - TA 2019 SPM No : 225, SP2D No : |
| 198 | Car Washer | KRISBOW / KW1800729 | B | Mesin Cuci Kendaraan (Pull Set) - TA 2019 |
| 199 | Scanner (Universal Tester) | Brother / DS-620 | B | Kegiatan Rekonsiliasi (Sulaiman,S.Kom) Rp. 98.373.000 |
| 200 | Container | - | B | Belanja Modal Pengadaan Bak Sampah Kontainer (Warna Kuning) - TA 2019 No. SPM : |
| 201 | Container | - | B | Belanja Modal Pengadaan Bak Sampah Kontainer (Warna Kuning) - TA 2019 No. SPM : |
| 202 | Lemari Besi/Metal | - | B | Lemari Arsip TA.2019 |
| 203 | Lemari Kayu | - | B | Lemari Kayu (partisi) TA. 2019 |
| 204 | Lemari Kayu | - | B | Lemari Kayu + Busa (partisi) ruang Laktasi TA. 2019 |
| 205 | Filing Cabinet Besi | 4 Laci | B | Filing Kabinet Type 4 laci - No. SPJ : 052/1.04.01-UP GUTU/38/III/20 19, SPM No : 028, SP2D No : 01159 TA 2019 |
| 206 | Filing Cabinet Besi | 4 Laci | B | Filing Kabinet Type 4 laci - No. SPJ : 052/1.04.01-UP GUTU/38/III/20 19, SPM No : 028, SP2D No : 01159 - TA 2019 |
| 207 | Alat Kantor Lainnya | Tong 5 R | B | Pengadaan Tong Sampah Kebersihan 5R (Perset 5 Tong) - TA 2019 SPM No : 235 , SP2D No : |
| 208 | Alat Kantor Lainnya | Tong 5 R | B | Pengadaan Tong Sampah Kebersihan |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 5R (Perset 5 Tong) - TA 2019 SPM No : 235 , SP2D No : |
| 209 | Alat Kantor Lainnya | Tong 5 R | B | Pengadaan Tong Sampah Kebersihan 5R (Perset 5 Tong) - TA 2019 SPM No : 235 , SP2D No : |
| 210 | Alat Kantor Lainnya | Tong 5 R | B | Pengadaan Tong Sampah Kebersihan 5R (Perset 5 Tong) - TA 2019 SPM No : 235 , SP2D No : |
| 211 | Alat Kantor Lainnya | Tong 5 R | B | Pengadaan Tong Sampah Kebersihan 5R (Perset 5 Tong) - TA 2019 SPM No : 235 , SP2D No : |
| 212 | Meja Kerja Kayu | Meja Staff | B | Meja Kerja Staff - TA 2019 |
| 213 | Kursi Besi/Metal Meubeleur lainnya | - | B | KURSI TUNGGU TA. 2019 |
| 214 | Meubeleur lainnya | - | B | Partisi Pekerjaan Counter dan Ruang Pengaduan TA. 2019 |
| 215 | Meubeleur lainnya | - / - | B | Partisi Pekerjaan Ruang Laktasi TA. 2019 |
| 216 | Mesin Pemotong Rumput | HONDA / GX35T 4 Tak | B | Mesin Potong Rumput 4Tak - TA 2019 |
| 217 | Mesin Pemotong Rumput | HONDA / UMR 435N | B | Pengadaan Mesin Potong Rumput - TA 2019 SPM No : 223, SP2D No : |
| 218 | Lemari Es | Gea Mini Bar / RS-06DR | B | Lemari ES TA.2019 |
| 219 | A.C. Window | Samsung / BB7E | B | AC 1 PK TA.2019 |
| 220 | Televisi | LG / 43LM5500PT | B | TV TA. 2019 |
| 221 | Camera Video | CANON / - | B | 06052/SP2D/2019 Belanja Camera Canon Tahun 2019 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|------------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 222 | Gordyin/Kray | kain blackout | B | Gorden TA.2019 |
| 223 | Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II | - / - | B | Lemari Arsip Pejabat TA 2019 06052/SP2D/20 |
| 224 | Alat komunikasi telephone lainnya (dst) | - / - | B | 06052/SP2D/2019 Belanja Alat Perekam |
| 225 | Alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst) | MOTOROLA / XiR P3688 | B | Pengadaan Radio HF/FM (Hand Talky) - T.A 2019 SPM No : , SP2D No : |
| 226 | Publik Address (Lapangan) | - | B | Pengadaan Spanduk Himbauan Kebersihan - T.A 2019 SPM No : , SP2D No : |
| 227 | Lemari Asam | WTW / - | B | 05787/SP2D/2019 Belanja Pengadaan Lemari Asam Tahun 2019 |
| 228 | Mesin Celup (Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil) | WQ50-7-2.2 | B | Pengadaan Mesin Celup Sedot Lumpur - T.A 2019 SPM No : , SP2D No : |
| 229 | Alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst) | WTW / Photolab 7600 UV/ViS | B | 05787/SP2D/2019 Belanja Alat Labartorium Spektrofotometer Tahun 2019 |
| 230 | Alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst) | WTW / PH 3110 Set 2 | B | 05787/SP2D/2019 Belanja Pengadaan PH Meter Tahun 2019 |
| 231 | Alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst) | WTW / OXI 3205 SET 1 | B | 05787/SP2D/2019 Belanja pengadaan Portabel DO Meter Tahun 2019 |
| 232 | Alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst) | WTW / Cond 3110 Set 1 | B | 05787/SP2D/2019 Belanja Pengaadaan Portabel Konduksi Meter Tahun 2019 |
| 233 | P.C Unit | Lenovo all in one / AIO A340 | B | PC TA. 2019 |
| 234 | P.C Unit | ASUS / PC | B | Pengadaan Komputer PC - TA 2019 SPM No : 239, SP2D No : |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 235 | Laptop | ASUS / TP412UA | B | LAPTOP TA 2019 |
| 236 | Laptop | ASUS / TP412UA | B | LAPTOP TA 2019 |
| 237 | Note Book | ASUS | B | Kegiatan Rekonsiliasi (Sulaiman, S.Kom) 626903000 |
| 238 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Epson / L4150 | B | Printer TA.2019 |
| 239 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON L3110 / L3110/ A4 | B | Printer A4 - TA 2019 |
| 240 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON L3110 / L3110 | B | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Printer - TA 2019 SPM No : , SP2D No : |
| 241 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON L3110 / L3110 | B | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Printer - TA 2019 SPM No : , SP2D No : |
| 242 | Peralatan Personal Komputer lainnya | ICA / - | B | UPS TA.2019 |
| 243 | Air Conditioning (AC) | AQUA | B | Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin (AC) - TA 2019 SPM No : , SP2D No : |
| 244 | Dump Truck | HINO / - | B | KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020 |
| 245 | Dump Truck | HINO / - | B | KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020 |
| 246 | Dump Truck | HINO / - | B | KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|-------------------|-----------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 247 | Dump Truck | HINO / - | B | KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020 |
| 248 | Dump Truck | HINO / - | B | KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020 |
| 249 | Dump Truck | HINO / - | B | KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020 |
| 250 | Truck & Bush Tyre | ISUZU / - | B | KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020 |
| 251 | Pompa Angin | Resun / Model GF 1100 | B | Belanja Mesin Pompa Udara ; 002/DPRKPKP-S PP/77bIX/2020 tgl. 16/09/2020, 002/BAHP/DPRK PKP/77B/IX/202 0 tgl.29/09/2020, SP2D No. SPM No. |
| 252 | Pompa Air | Shimizu / - | B | Mesin Pompa Air ; 001/FAK-GMG/I V/2020 Tgl.27/04/2020, 001/BAHP/DPRK PKP/77a/IV/202 0 Tgl.27/04/2020, No.GU 0233/1.04.01-U PGUTU/77A/VI/ 2020 tgl. 19-Jun-2020, SP2D No.03969/SP2D /2020 tgl.12/06/2020, SPM |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|-----------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | No.126/1.04.01/ 2020 tgl.06/11/2020 |
| 253 | Sepeda Motor | HONDA / - | B | KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020 |
| 254 | Sepeda Motor | HONDA / - | B | KEPUTUSAN WALI KOTA TANUNGPINAN G NOMOR 887 TAHUN 2020 |
| 255 | Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst) | - / - | B | Pengadaan Mesin Pencacah Kompos ; 01/FAK-GMG/VI /2020 Tgl. 15/06/2020, 001/BAHP/DPRK PKP/78a/VI/202 0 Tgl. SP2D No.02367/SP2D /2020 Tgl.29/07/2020, SPM No. 068/1.04.01/20 20 Tgl. 27/07/2020 TAHUN 2020 |
| 256 | Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst) | - / - | B | Pengadaan Mesin Pencacah Kompos ; 01/FAK-GMG/VI /2020 Tgl. 15/06/2020, 001/BAHP/DPRK PKP/78a/VI/202 0 Tgl. SP2D No.02367/SP2D /2020 Tgl.29/07/2020, SPM No. 068/1.04.01/20 20 Tgl. 27/07/2020 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|-----------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | TAHUN 2020 |
| 257 | Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya (dst) | - / - | B | Pengadaan Mesin Pencacah Kompos ; 01/FAK-GMG/VI /2020 Tgl. 15/06/2020, 001/BAHP/DPRK PKP/78a/VI/202 0 Tgl. SP2D No.02367/SP2D /2020 Tgl.29/07/2020, SPM No. 068/1.04.01/20 20 Tgl. 27/07/2020 TAHUN 2020 |
| 258 | Container | - / - | B | Belanja Modal Pengadaan Bak Sampah Kontainer; 001/SPPP/BD-S ARPRAS/BMPBS K/PL/2020 tgl.11/12/2020, 001/BAHP/DPRK PKP/BMPBSK/PL /83/XII/2020 tgl.18/12/2020, SP2D No. SPM No.228/1.04.01/ 2020 tgl.18/12/2020. |
| 259 | Lemari Kayu | - / - | B | LEMARI FILE PENYIMPANAN 05966/SP2D/20 20 |
| 260 | Lemari Kayu | - / - | B | LEMARI FILE PENYIMPANAN 05966/SP2D/20 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|-----------------------|-----------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 20 |
| 261 | Filing Cabinet Besi | - / - | B | FILLING CABINET 1 UNIT SP2D : /SP2D/2020 |
| 262 | LCD Projector/Infocus | ACER / - | B | PROYEKTOR 1 UNIT 04998/SP2D/20 20 |
| 263 | Papan Tulis | - / - | B | PARTISI PAPAN TULIS 05966/SP2D/20 20 |
| 264 | Meja Rapat | - / - | B | PARTISI MEJA RAPAT 2 X 4 M 05966/SP2D/20 20 |
| 265 | Meja 1/2 Biro | - / - | B | Belanja Pengadaan Meja Kerja Pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Tangga. No GU 0117/1.04.01-U PGUTU/40B/IV/ 2020 tgl.09-Apr-2020, SPM No. 006/1.04.01/20 20 tgl 10-Feb-2020 Faktur No : 07/FAK- P.B.K/II I/2020 |
| 266 | Kursi Putar | - / - | B | Belanja Pengadaan Meja Kerja Pada Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Tangga. No GU 0117/1.04.01-U PGUTU/40B/IV/ 2020 tgl.09-Apr-2020, SPM No. 006/1.04.01/20 20 tgl 10-Feb-2020 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Faktur No : 07/FAK- P.B.K/II I/2020 |
| 267 | Partisi | - / - | B | PINTU BAWAH JENDELA 05966/SP2D/20 20 |
| 268 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | - / - | B | - |
| 269 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | - / - | B | MEJA SEKRETARIS 05966/SP2D/20 20 |
| 270 | P.C Unit | LENOVO A340 / i5 9400T | B | PC UNIT 1 BUAH 05681/SP2D/20 20 |
| 271 | Dump Truck | - | B | PENGADAAN BAK DUMP TRUCK |
| 272 | Dump Truck | - | B | PENGADAAN BAK DUMP TRUCK |
| 273 | Dump Truck | - | B | PENGADAAN BAK DUMP TRUCK |
| 274 | Dump Truck | - | B | PENGADAAN BAK DUMP TRUCK |
| 275 | Lemari Besi/Metal | STEEL CO / W012/ 2 PINTU | B | BAST : 001/BASTB/ DPRKPP/XII/202 1 TGL 17 DES 2021- BELANJA MODAL LEMARI ARSIP 03281/SP2D/20 21 TGL 16/08/2021 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|---------------------------|----------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 276 | Filing Cabinet Besi | Kenji / JF V004A | B | filing cabinet 4 laci 03335/SP2D/20 21 |
| 277 | Filing Cabinet Besi | Kenji / JF V004A | B | filing cabinet 4 laci 03335/SP2D/20 21 |
| 278 | Filing Cabinet Besi | STEEL CO / K003 | B | BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 |
| 279 | Alat Penghancur Kertas | NEU UNITED / ET -12M | B | BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021 |
| 280 | Meja Kerja Besi/Metal | Expo / MTM/3001 MH | B | BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021 |
| 281 | Kursi Rapat | KEFTJ / 987 BLACK | B | BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 282 | A.C. Split | mitsubishi | B | BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021 |
| 283 | A.C. Split | GREE / AC FLOOR STANDING | B | BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021 |
| 284 | Gordyin/Kray | NORTON | B | BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021 |
| 285 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | Orbitrend / 1/2 biro | B | 03335/SP2D/20 21 |
| 286 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1/2 biro | B | 03335/SP2D/20 21 |
| 287 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | ERGOSIT / TIGHER HIGH 3001 | B | BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|----------------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 21 tgl 16/08/2021 |
| 288 | P.C Unit | Asus | B | 03335/SP2D/20 21 |
| 289 | Lap Top | ASUS / M413IA- VIPS5 51 | B | BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021 |
| 290 | Lap Top | HP / GAMING 15DK-1041T | B | BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021 |
| 291 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / L3110 | B | BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|-----------------------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 292 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | EPSON / L3110 | B | BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021 TGL 17 DES 2021 - Belanja Modal alat Penyimpan 03281/SP2D/20 21 tgl 16/08/2021 |
| 293 | Dump Truck | HINO / XZU349R- HKFT BD3 | B | truk amroll/SP2D no.32.05/04.0/0 00108/LS/2.11. 1.03.0.00.11.00 00/P.02/10/202 2 |
| 294 | Dump Truck | HINO / XZU349R- HKFT BD3 | B | truk amroll/SP2D no.32.05/04.0/0 00108/LS/2.11. 1.03.0.00.11.00 00/P.02/10/202 2 |
| 295 | Mesin Bor Tanah | FIRMAN / FPD62 | B | Mesin bor tanah/ SP2D no. 32.05/04.0/000 077/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/8/2022 |
| 296 | Mesin Bor Tanah | FIRMAN / FPD62 | B | Mesin bor tanah/ SP2D no. 32.05/04.0/000 077/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/8/2022 |
| 297 | kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst) | VIAR / V15RL M/T | B | Motor roda tiga/ SP2D no. 32.05/04.0/000 055/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.01/7/2022 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|---------------------|--------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 298 | Gerobak Dorong | COSTUM / COSTUM | B | Gerobak pilah/ SP2D no. 32.05/04.0/000 055/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.01/7/2022 |
| 299 | Container | COSTUM / COSTUM | B | Kontainer bak sampah |
| 300 | Filing Cabinet Besi | - | B | Belanja Modal Filing Cabinet Besi di Ruang Keuangan No : 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022 |
| 301 | Filing Cabinet Besi | - | B | Belanja Modal Filing Cabinet Besi di Ruang Keuangan No : 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022 |
| 302 | Filing Cabinet Besi | - | B | Belanja Modal Filing Cabinet Besi di Ruang Keuangan No : 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022 |
| 303 | Kontainer | COSTUM / COSTUM | B | kontainer bak sampah/No.SP2 D 32.05/04.0/000 100/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/9/2022 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|---|----------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 304 | Kontainer | COSTUM / COSTUM | B | kontainer bak sampah/No.SP2 D 32.05/04.0/000 100/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/9/2022 |
| 305 | CCTV - Camera Control Television System | HILOOK | B | CCTV/SP2D no. 32.05/04.0/000 021/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.02/9/2022 |
| 306 | LCD Projector/Infocus | INFOCUS / IN136 | B | Proyektor/ SP2D no. 32.05/04.0/000 076/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/8/2022 |
| 307 | LCD Projector/Infocus | INFOCUS / IN112AA | B | Proyektor/SP2D no. 32.05/04.0/000 007/GU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.02/9/2022 |
| 308 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | - | B | Layar proyektor/ SP2D no.32.05/04.0/0 00076/LS/2.11. 1.03.0.00.11.00 00/P.02/8/2022 |
| 309 | Walkthrough/ Portal Metal Detector | COSTUM / COSTUM | B | Portal/ SP2D no. 32.05/04.0/000 154/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.03/12/2022 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|---------------------------------|--------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 310 | Partisi | COSTUM / COSTUM | B | Partisi ruangan/SP2D no.32.05/04.0/0 00115/LS/2.11. 1.03.0.00.11.00 00/P.03/11/202 2 |
| 311 | Lemari Es | Electrolux / ESE5441A | B | Lemari es 2 pintu/ SP2D no. 32.05/04.0/000 154/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.03/12/2022 |
| 312 | Karpet | COSTUM / COSTUM | B | karpet bulu/SP2D no. 32.05/04.00000 21/TU/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/9/2022 |
| 313 | Gordyin/Kray | COSTUM / COSTUM | B | Gordyin dan besi/reel/ SP2D no. 32.05/04.0/000 021/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.02/9/2022 |
| 314 | Gordyin/Kray | COSTUM / COSTUM | B | gordyin/ SP2D no. 32.05/04.0/000 127/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.03/2022 |
| 315 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | COSTUM / COSTUM | B | meja kerja/ SP2D no. 32.05/04.0/000 075/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/08/2022 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|--------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 316 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | orbitrend | B | Belanja Modal Meja Kerja 1/2 Biro di Bid PPKL No : 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022 |
| 317 | Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II | COSTUM / COSTUM | B | meja dan kursi tamu/ SP2D no. 32.05/04.0/000 075/LS/2.11.1.0 .3.0.00.11.0000 /P.02/08/2022 |
| 318 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | COSTUM / COSTUM | B | kursi kerja pejabat eselon 2/ SP2D no. 32.05/04.0/000 075/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/08/2022 |
| 319 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | COSTUM / COSTUM | B | Kursi kerja eselon IV/SP2D no. 32.05/04.0/000 075/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/08/2022 |
| 320 | Microphone/Wireless MIC | - | B | Belanja Modal Microphone No : 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022 |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|-------------------|---|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 321 | Mesin Cetak | COSTUM / COSTUM | B | mesin cetak paving blok/SP2D No. 32.05/04.0/000 066/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.02/7/2022 |
| 322 | TV Monitor | SAMSUNG / FHD- 40N5000 | B | TV LED/ SP2D no. 32.05/04.0/000 021/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.02/9/2022 |
| 323 | Personal Computer | HP / ELITEONE | B | Komputer PC all in 1/ SP2D no. 32.05/04.0/000 128/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.03/11/2022 |
| 324 | P.C Unit | All in one lenovo / Lenovo intel core i3 10110u, 4 GB DDR4, SSD 512 GB | B | Belanja Modal P.C di Bid.PSLB3 No : 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022 |
| 325 | P.C Unit | All in one lenovo / Lenovo intel core i3 10110u, 4 GB DDR4, SSD 512 GB | B | Belanja Modal P.C di Bid.Tata Lingkungan No : 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|---|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 326 | P.C Unit | All in one lenovo / Lenovo intel core i3 10110u, 4 GB DDR4, SSD 512 GB | B | Belanja Modal P.C di TU No : 32.05/04.0/000 007/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022 |
| 327 | Lap Top | Lenovo / core i7 8550u/1165G 7 | B | Belanja Modal Lap top di Bid.PSLB3 No : :32.05/04.0/000 009/TU/2.11.1. 03.0.00.11.0000 /P.01/4/2022 |
| 328 | Lap Top | MSi / , intel core i7-1195G7, | B | Belanja Modal Laptop di Bid. PPKLH No : 32.05/04.0/000 024/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.01/4/2022 |
| 329 | Lap Top | MSi / , intel core i7-1195G7, | B | Belanja Modal Laptop di Keuangan No : 32.05/04.0/000 024/LS/2.11.1.0 3.0.00.11.0000/ P.01/4/2022 |
| 330 | Lap Top | MSi / , intel core i7-1195G7, | B | Belanja Modal Laptop di Program No : 32.05/04.0/000 024/LS/2.11.1.03.0.00. 11.0000/P.01/4/2022 |
| 331 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Pinter epson / LQ 310 | B | Belanja Modal Printer di Keuangan No : 32.05/04.0/000007/TU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.01/4/2022 |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|-----------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 332 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Pinter epson / L4160 | B | Belanja Modal Printer di Bid. PSLB3 No : 32.05/04.0/000007/TU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.01/4/2022 |
| 333 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Pinter epson / LX-310 | B | 32.05/03.0/000126/LS/ 2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.03/11/2022 |
| 334 | Sepatu Boot | - | B | Sepatu boot/SP2D no.32.05/04.0/000010/ GU/2.11.1. 03.0.00.11.0000/P.03/ 11/2022 |
| 335 | P3K, Advanced / Extended Care | - | B | Belanja Modal Kotak P3K No : 32.05/04.0/000007/TU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.01/4/2022 |
| 336 | Kursi Biasa | Chitose | B | Kursi Biasa |
| 337 | Meja 1/2 Biro | Victor | B | Meja 1/2 Biro |
| 338 | Kursi Biasa | Chitose | B | Kursi Biasa |
| 339 | Filing Cabinet Besi | Brother | B | Filing Cabinet |
| 340 | Lemari Kaca | Victor | B | Lemari Kaca |
| 341 | Meja 1/2 Biro | Victor | B | Meja 1/2 Biro |
| 342 | Kursi Putar | - | B | Kursi Putar |
| 343 | Kursi Biasa | Chitose | B | Kursi Biasa |
| 344 | alat ukur universal lainnya (dst) | - | B | Statis |
| 345 | alat timbangan/biara lainnya (dst) | Tripel Beam / 700/800 | B | Timbangan teknis |
| 346 | Botol Uji Berbagai Ukuran | - | B | Botol sampel 500,800,1000,1000 Ltr |
| 347 | Filing Cabinet Kayu | - | B | Filling cabinet |
| 348 | Kursi Kerja Pejabat lainnya | olympic | B | Kursi Rapat |
| 349 | alat kedokteran poliklinik lainnya (dst) | - | B | Vinyil Gloves |
| 350 | Incubator (Alat Laboratorium Umum) | haar-synth | B | Thermometer dinding |
| 351 | Mortar (Alat Laboratorium Umum) | - | B | Cawan porselen |
| 352 | Blender | Hamilton B | B | Blender |
| 353 | Stop Watch | CasioHS-3 | B | Stop watch Digital |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|-------------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 354 | Corong | yenaco | B | corong |
| 355 | B O D Meter | Pyrex | B | Botol reaksi BOD 300ml |
| 356 | Crusible Penyaring | iwaki | B | Gelas ukur |
| 357 | Lampu Spritus | - | B | Lampu spritus |
| 358 | Lempeng Tetes | - | B | Pipet Tetes |
| 359 | alat laboratorium umum lainnya (dst) | Duran | B | Erlenmeyer |
| 360 | Petri Dish | Herma | B | Petri disk 10 cm |
| 361 | laboratorium kearsipan lainnya (dst) | iwaki | B | Pipet volum / gondok 25 cm |
| 362 | laboratorium kearsipan lainnya (dst) | Yamaco | B | Pinset membran |
| 363 | laboratorium kearsipan lainnya (dst) | cap 35l | B | Pipet Volum/Gondok 15cm |
| 364 | laboratorium kearsipan lainnya (dst) | iwaki | B | Pipet volum/gondok 50 cm |
| 365 | alat laboratorium penunjang lainnya (dst) | Lion star | B | Ice box |
| 366 | Meja 1/2 Biro | HD / 50i Topix | B | Meja Tulis |
| 367 | Kursi Fiber Glas/Plastik | - | B | Kaca Arloji |
| 368 | Rice Warmer | Cosmos | B | Dispenser |
| 369 | alat laboratorium umum lainnya (dst) | - | B | ErlenMeyer |
| 370 | Gelas Kimia | - | B | Gelas Kimia |
| 371 | alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst) | - | B | Jarum Ose |
| 372 | Regulated Alt Gampiar | - | B | Tabung Durham |
| 373 | alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst) | - | B | Lampu Bunsen |
| 374 | Kursi Biasa | - | B | Kursi Kerja |
| 375 | Stationary Water Pump | Sanyo / PH100 | B | Mesin Air |
| 376 | Mesin Bor | - | B | Mesin Bor |
| 377 | Kipas Angin | KDK | B | Kipas Angin Gantung |
| 378 | Kursi Kerja Pejabat lainnya | Futura | B | Kursi Kerja |
| 379 | B O D Meter | - | B | Botol BOD 250 ml |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|--|-------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 380 | Crusible Penyaring | - | B | Tabung Reaksi |
| 381 | Standard Klem Burete | - | B | Klem Buret |
| 382 | Pipette Filter | - | B | Pipet Filter |
| 383 | Spoon Set | - | B | Sendok Porselen |
| 384 | Steril Bottle Witt, Cup | - | B | Botol Reagen Coklat 1000 ml |
| 385 | Steril Bottle Witt, Cup | - | B | Botol Reagen Coklat 500 ml |
| 386 | Steril Bottle Witt, Cup | - | B | Botol Reagen Putih 1000 ml |
| 387 | Dropping Bottle | - | B | Dropping Bottle 60 ml |
| 388 | Spatula | - | B | Spatula (stanleesteel) |
| 389 | Pipet Tetes | - | B | Pipet Tetes Panjang |
| 390 | Rak Tabung Reaksi | - | B | Rak Tabung Reaksi |
| 391 | Sumbat Tabung Reaksi + Pipa Lurus | - | B | Tutup Tabung Reaksi |
| 392 | Sikat Tabung Reaksi Besar Kecil | - | B | Sikat Tabung Reaksi |
| 393 | Bor | - | B | Alat Bor Biopori |
| 394 | Gordyin/Kray | - | B | Tempat Sampah |
| 395 | Kursi Rapat | Futura | B | Kursi Rapat |
| 396 | Kipas Angin | Panasonic | B | Kipas Angin |
| 397 | Tangga Aluminium | Super BBP | B | Tangga |
| 398 | Jaring Angkat Lainnya | - | B | - |
| 399 | Papan Pengumuman | - | B | penambahan |
| 400 | Meja Komputer | - | B | - |
| 401 | Kipas Angin | Panasonic | B | penambahan |
| 402 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | - | B | penambahan (Jas Hujan) |
| 403 | alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst) | vistar/orex | B | penambahan |
| 404 | Rambu Papan Tambahan | - | B | Papan Tanda Larangan |
| 405 | Rambu Papan Tambahan | - | B | Papan Tanda Larangan |
| 406 | Rambu Papan Tambahan | - | B | Papan Tanda Larangan |
| 407 | Rambu Papan Tambahan | - | B | Papan Tanda Larangan |
| 408 | Rambu Papan Tambahan | - | B | Papan Tanda Larangan |
| 409 | Alat Kantor Lainnya | - | B | TONG SAMPAH 5R |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|---|--------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 410 | Alat Kantor Lainnya | - | B | TONG SAMPAH 5R |
| 411 | Kursi Biasa | SAVELLO / PUTAR | B | KURSI KERJA STAF / PUTAR |
| 412 | alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst) | - | B | Cangkul + Tangkai |
| 413 | alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst) | - | B | Guntingan Tanaman |
| 414 | alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst) | - | B | Skop besi |
| 415 | alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst) | - | B | Gerobak dorong besi |
| 416 | alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst) | - | B | Swendok semen |
| 417 | alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst) | - | B | Tangki Semprot Tanaman 20 ltr |
| 418 | Kursi Rapat | FUTURA | B | KURSI RAPAT Ta. 2019 |
| 419 | Kursi Rapat | FUTURA | B | Kursi Rapat (Warna Merah) - T.A 2019 SPM No : ,SP2D No : |
| 420 | Kursi Biasa | Kursi Staff | B | Kursi Kerja Staf- TA 2019 |
| 421 | White Board | COSTUM | B | NO BAST : 001/BASTB/DPRKPP/ XII/2021 TANGGAL 17 DES 2021 - BELANJA ALAT KANTOR LAINNYA - 05566/SP2D/2021 TGL 18 NOV 2021 - |
| 422 | Gordyin/Kray | NORTON | B | BAST : 001/BASTB/DPR KPP/XII/2021, TGL 17 DES 2021 |
| 423 | Gordyin/Kray | NORTON | B | BAST : 001/BASTB/DPR |



| No | Nama Barang | Luas (M2) | K I B | Keterangan |
|-----|-----------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | KPP/XII/2021, TGL 17 DES 2021 |
| 424 | Jaring Angkat Lainnya | - | B | Belanja Modal Jaring penutup bak lori di Bid. PSLB3 No : 32.05/04.0/000 009/TU/2.11.1.03.0.00 .11.0000/P.01/4/2022 |
| 425 | Kursi Fiber Glas/Plastik | Napoly | B | Belanja Modal Kursi Plastik No : 32.05/04.0/000007/TU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.01/4/2022 |
| 426 | Kursi Putar | - | B | Belanja Modal kursi rapat putar di Ruang Rapat Lantai 2 No : 32.05/04.0/000007/TU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.01/4/2022 |
| 427 | Loudspeaker | KISONLI / TM-1000U | B | Seaker aktif /SP2D no. 32.05/04.0/000012/GU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.03/12/2022 |
| 428 | Megaphone | Megaphone/ toa | B | Belanja Modal Megaphone/ toa No : 32.05/04.0/000007/TU /2.11.1.03.0.00.11.000 0/P.01/4/2022 |



3. Sarana dan Prasarana Kantor Berdasarkan KIB C

| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|---|-----------|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 494.00 | C | Bangunan Laboratorium |
| 2 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 82.25 | C | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen |
| 3 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | - | C | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen |
| 4 | Gedung Pos Jaga Permanen | 4.90 | C | Gedung Pos Jaga Permanen |
| 5 | Gedung Garasi/Pool Permanen | 140.00 | C | Gedung Gerasi/Pool Permanen |
| 6 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 24.00 | C | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen |
| 7 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 36.00 | C | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen |
| 8 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 36.00 | C | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen |
| 9 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | 36.00 | C | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen |
| 10 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | 555.00 | C | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen |
| 11 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | 140.00 | C | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | 31.50 | C | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen |
| 13 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | 350.00 | C | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen |
| 14 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | 161.00 | C | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen |
| 15 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | 360.00 | C | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen |
| 16 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | 400.00 | C | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen |
| 17 | Gedung Garasi/Pool Permanen | 48.00 | C | Gedung Gerasi/Pool Permanen |
| 18 | Gedung Pos Jaga Permanen | - | C | - |
| 19 | Bangunan Gedung Instalasi lain-lain | - | C | PERCONTOHAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH |
| 20 | Bangunan Gedung Instalasi lain-lain | - | C | PERCONTOHAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH |
| 21 | Bangunan Gedung Instalasi lain-lain | - | C | PERCONTOHAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH |
| 22 | Bangunan Gedung Instalasi lain-lain | - | C | PEMBANGUNAN INSTALASI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN GAS METAN DI TPA GANET |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Bangunan Gedung Instalasi lain-lain | - | C | PEMBANGUNAN INSTALASI GAS KE PENDUDUK SEKITAR TPA GANET |
| 24 | Gedung Pos Jaga Permanen | - | C | PEMBANGUNAN POS JEMBATAN TIMBANG |
| 25 | Tugu lainnya (dst) | - | C | PANGGUNG BALEHO RANGKA BESI |
| 26 | Tugu lainnya (dst) | - | C | PANGGUNG BALEHO RANGKA BESI |
| 27 | Tugu lainnya (dst) | - | C | PANGGUNG BALEHO RANGKA BESI |
| 28 | Tugu lainnya (dst) | - | C | PANGGUNG BALEHO RANGKA BESI |
| 29 | Istana Peninggalan | - | C | PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG UNTUK PUBLIKASI SAMPAH DI TPA GANET |
| 30 | Istana Peninggalan | - | C | PEMBANGUNAN TANGGUL SEL DAN SALURAN DRAINASE DI TPA GANET |
| 31 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | - | C | PEMBANGUNAN BAK RETENSI AIR LINDI DI TPA GANET |
| 32 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | - | C | PEMBANGUNAN PAGAR AREA IPLT BARU TPA GANET |
| 33 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst) | - | C | PEMBANGUNAN LANDASAN TPS KONTAINER |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|---|-----------|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Istana Peninggalan | - | C | JALAN PENDEKAT JEMBATAN TIMBANG TPA GANET |
| 35 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | - | C | Rumah Kompos (DAK) SP2D No. 04798 |
| 36 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen | - | C | Landasan TPS Kontainer (02379/SP2D/20 18) |
| 37 | Tugu Peringatan Lainnya | 1800 | C | Pembuatan Prasasti TA. 2019 |
| 38 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | - | C | |
| 39 | Bangunan Gudang Lain-lain (dst) | - | C | Revitalisasi Gudang di TPA Ganet; 11/02.03/SPK-PL /DPRKPKP/38j/IX /2020 tgl.08/09/2020, 001/BAHP/DPRK PKP/38j/XI/2020 tgl.06/11/2020, SP2D No.09115/SP2D/ 2020 tgl.11/12/2020, SPM No.158/1.04.01/ 2020 tgl.08/12/2020. + PERENCANAAN DAN PENGAWASAN |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|---|-----------|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst) | - | C | Pembangunan Ruang Serba Guna TPA Ganet; 10/02.03/SPK-PL/DPRKPKP/38i/IX/2020 tgl.08/09/2020, 001/BAHP/DPRKPKP/38i/XI/2020 tgl.06/11/2020, SP2D No.04975/SP2D/2020 tgl.10/12/2020, SPM NO.159/1.04.01/2020 tgl.08/12/2020. + PERENCANAAN 2019 DAN PENGAWASAN |

4. Sarana dan Prasarana Kantor Berdasarkan KIB D

| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|------------------|-----------|-----|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 2 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 3 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 4 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 5 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 6 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 7 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 8 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 9 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 10 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 11 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 12 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|------------------|-----------|-----|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 14 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 15 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 16 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 17 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 18 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 19 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 20 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 21 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 22 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 23 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 24 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 25 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 26 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 27 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 28 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 29 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 30 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 31 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 32 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 33 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 34 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 35 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 36 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 37 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 38 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 39 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 40 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Sumur Resapan |
| 41 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Konstruksi Sumur Resapan |
| 42 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Konstruksi Sumur Resapan |
| 43 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Konstruksi Sumur Resapan |
| 44 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Konstruksi Sumur Resapan |
| 45 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Konstruksi Sumur Resapan |
| 46 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Konstruksi Sumur Resapan |
| 47 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Konstruksi Sumur Resapan |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|---|-----------|-----|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Konstruksi Sumur Resapan |
| 49 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Konstruksi Sumur Resapan |
| 50 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Konstruksi Sumur Resapan |
| 51 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Konstruksi Sumur Resapan |
| 52 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Konstruksi Sumur Resapan |
| 53 | Sumur Gali (SGL) | - | D | Konstruksi Sumur Resapan |
| 54 | Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) | - | D | Sumur Resapan |
| 55 | Jaringan Transmisi Lain-lain | - | D | Gedung Laboratorium |

5. Sarana dan Prasarana Kantor Berdasarkan KIB E

| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|---|-----------|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Hukum | 1 | E | Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 2 | Hukum | 4 | E | Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 3 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) | 2 | E | Bioindikator Kualitas Udara |
| 4 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) | 2 | E | Bioindikator Kualitas Air |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|---|-----------|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) | 1 | E | Global Warning For Beginner Pengantar Komprehensif Tentang Pemanasan Global |
| 6 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) | 1 | E | Kesehatan Lingkungan |
| 7 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) | 2 | E | Menata Ruang Laut Terpadu |
| 8 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) | 2 | E | Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup |
| 9 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) | 1 | E | Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 10 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) | 2 | E | Pencemaran Pesisir dan Laut |
| 11 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) | 2 | E | Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan |
| 12 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) | 2 | E | Pengelolaan Kualitas Air |
| 13 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) | 1 | E | Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 2008 |
| 14 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya | 1 | E | Perpajakan Bendaharawan Pemerintah |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|---|-----------|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | (dst) | | | |
| 15 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) | 2 | E | Sistem Pengelohan Lingkungan dan Limbah Industri |
| 16 | Buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst) | 3 | E | Toksikologi Lingkungan |

6. Sarana dan Prasarana Kantor Berdasarkan KIB L

| No. | Nama Barang | Luas (M2) | KIB | Keterangan |
|-----|-------------|-----------|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Software | | L | - |
| 2 | Software | | L | 05637/SP2D/2019 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-Software Tahun 2019 |
| 3 | Software | | L | Software Aplikasi Sistem Pelaporan JAKSTRADA TA.2019 |
| 4 | Software | | L | Website informasi tentang Kantor TA. 2019 |



2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dirincikan pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8.



Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Formula Indikator | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun Ke- | | | |
|----|---|--|--------|-------------|------------|--------------------------|---|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | Terwujudnya pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi kota yang ramah lingkungan | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | Terlaksananya pembangunan dengan memperhatikan mutu lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan | Persentase terlaksananya pembangunan yg memperhatikan mutu lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Persentase penurunan timbulan sampah Kota Tanjungpinang | Jumlah pengurangan timbulan sampah dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100 | % | | | | 20 | 22 | 24 | 26 | 14.26 | 18.72 | 22.09 | 22.41 | 71.3 | 85.0909091 | 92.0416667 | 86.1923077 |
| | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indeks kualitas air | nilai indeks kualitas air | Indeks | | | | 40 | 40 | 41 | 41 | 62.44 | NA | 50 | 53.64 | 156.1 | #VALUE! | 121.95122 | 130.829268 |
| | Indeks kualitas udara | nilai indeks kualitas udara | Indeks | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 88.01 | 90.59 | 90.36 | 85.28 | 97.7888889 | 100.6555556 | 100.4 | 94.7555556 |
| | Indeks tutupan lahan | nilai indeks tutupan hutan | Indeks | | | | 42.62 | 43.62 | 44.62 | 45.62 | 34 | 37.8 | 35.76 | 35.86 | 79.7747536 | 86.6574966 | 80.1434334 | 78.6058746 |
| | Persentase aksi mitigasi dan adaptasi RAD yang dilaksanakan | jumlah aksi adaptasi & mitigasi yang dilaksanakan dibagi jumlah aksi adaptasi dan mitigasi yang ada | % | | | | 30 | 40 | 50 | 60 | NA | NA | NA | 63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 105 |
| | Persentase data dan informasi tentang lingkungan hidup | penyediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup yang up to date | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

| Uraian (Program Nomenklatur Lama) Berdasarkan RPJMD/Renstra 2018-2023 | Uraian (Program Nomenklatur Baru) Berdasarkan Pemendagri 90 Tahun 2019 | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Perogram Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 1,790,200,740 | 1,387,442,870 | | | 1,720,875,528 | 1,310,327,748 | | | 96.12751741 | 94.44192452 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1,588,821,805 | 1,515,601,638 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 762,600,000 | 230,790,000 | | | 741,145,945 | 229,443,371 | | | 97.1867224 | 99.41651328 | #DIV/0! | #DIV/0! | 496,695,000 | 485,294,658 |
| Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 10,000,000 | - | | | 9,939,490 | - | | | 99.3949 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5,000,000 | 4,969,745 |
| Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | 426,979,999 | 355,955,000 | | | 369,097,439 | 265,968,430 | | | 86.44373035 | 74.71967805 | #DIV/0! | #DIV/0! | 391,467,500 | 317,532,935 |
| Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | 2,403,629,750 | 332,418,000 | | | 2,051,037,303 | 62,466,230 | | | 85.33083363 | 18.79147038 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1,368,023,875 | 1,056,751,767 |
| Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | | 588,169,200 | 200,000,000 | | | 570,619,070 | 197,508,455 | | | 97.01614263 | 98.7542275 | #DIV/0! | #DIV/0! | 394,084,600 | 384,063,763 |
| Program Rehabilitasi Pemulihan Cadangan SDA | | 168,430,000 | - | | | 153,793,064 | - | | | 91.30978092 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 84,215,000 | 76,896,532 |
| Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | 485,840,500 | - | | | 415,027,121 | - | | | 85.42456238 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 242,920,250 | 207,513,561 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota | | | 7,310,930,355 | 15,824,995,613 | | | 7,211,164,316 | 15,032,437,291 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98.63538518 | 94.99173117 | 11,567,962,984 | 11,121,800,804 |
| | Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan | | | 717,764,740 | 896,555,878 | | | 707,025,757 | 832,342,120 | #DIV/0! | #DIV/0! | 98.50382968 | 92.83772941 | 807,160,309 | 769,683,939 |
| | Program Pengelolaan Persampahan | | | 399,852,905 | 9,051,167,287 | | | 376,582,786 | 8,276,958,443 | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.18033014 | 91.44630942 | 4,725,510,096 | 4,326,770,615 |
| | Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3 | | | 1,518,560,100 | - | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 759,280,050 | - |
| Total | | 6,635,850,189 | 2,506,605,870 | 9,947,108,100 | 25,772,718,778 | 6,031,534,960 | 2,065,714,234 | 8,294,772,859 | 24,141,737,854 | 90.89317553 | 82.41081132 | 83.38878773 | 93.67167687 | 11,215,570,734 | 10,133,439,977 |



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang di dalam 3 (tiga) tahun ke depan, akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat pusat dan provinsi serta dipengaruhi oleh rencana pengembangan wilayah kota.

Tantangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang harus di hadapi antara lain :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan :

1. Tersedianya SDM, sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah;
2. Tersedianya SDM sebagai Juru Pungut Retribusi Kebersihan
3. Tersedianya SDM, saran dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup;
4. Terpantaunya kualitas air sungai dan udara ambien secara berkala dan representative;
5. Kualitas SDM yang masih dapat dioptimalkan;
6. Tersediaya dokumen Jakstrada;
7. Tersedianya TPS 3R dan bank sampah;
8. Tersedianya Kelompok Binaan Program Kampung Iklim menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
9. Pelayanan Prima dalam Penerbitan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Tersedianya data/informasi lingkungan hidup yang Update

b. Kelemahan :

1. Sarana dan prasarana yang telah melebihi umur teknis;
2. Keterbatasan lahan untuk TPA;



3. Terbatasnya jumlah dan pengetahuan/kopetensi SDM yang bersifat teknis
 4. Sarana dan prasarana belum optimal dalam mendukung lancarnya pekerjaan;
 5. Masih rendahnya kompetensi pegawai pada setiap bidang;
 6. Kurangnya personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Pengendali Dampak Lingkungan;
 7. Belum adanya personil Penyuluh Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lingkungan;
 8. Belum optimalnya manajemen SDM bidang persampahan;
 9. Belum tersedianya laboratorium lingkungan sebagai pendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan.
2. Faktor Eksternal
- a. Peluang
 1. Komitmen Kepala Daerah dalam menciptakan kota yang maju, sehat dan bahagia;
 2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam menangani urusan lingkungan hidup;
 3. Adanya mitra kerja dan potensi peran serta masyarakat di Kota Tanjungpinang yang cukup banyak, untuk mendukung terwujudnya kota yang maju, sehat dan bahagia;
 4. Adanya Payung Hukum (Peraturan Perundangundangan) yang jelas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah, penataan ruang;
 - b. Tantangan
 1. Meningkatnya volume sampah kota akibat pertumbuhan penduduk;



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

2. Pengurangan sampah dari sumbernya masih belum optimal;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi sampah;
4. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup;
5. Tingginya alih fungsi lahan yang berpotensi mengurangi luasan RTH di Kota Tanjungpinang;
6. Ketidakstabilan harga sampah sehingga menyebabkan keuntungan dan minat menabung sampah di Bank Sampah berkurang.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2023-2026. Program dan kegiatan yang disusun diharapkan mampu melaksanakan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan ataupun permasalahan yang akan dihadapi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Belum Optimalnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan | Luasan RTH Belum Memenuhi Standar Perkotaan |
| | | | Semakin Berkurangnya Lahan yang Bervegetasi |
| | | Rendahnya Kondisi Kualitas Air | Pengukuran Kualitas Air Belum Optimal |
| | | | Tingginya Resiko Pencemaran Air Akibat Limbah |
| | | Kualitas Udara Belum Optimal | Tingginya Emisi Udara |
| | | | Tidak Terintegrasi Data Pengendalian Perubahan Iklim |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Regulasi Lingkungan Hidup Belum Optimal | Rendahnya Penegakan Hukum terhadap Ketidaktaatan Pelaksanaan Regulasi Lingkungan Hidup |
| | | | Rendahnya Pemahaman Masyarakat dan/atau Dunia Usaha tentang Pelaksanaan Regulasi Lingkungan Hidup |
| | | | Kurangnya Kuantitas dan kualitas SDM |
| | Pembangunan Infrastruktur Wilayah Belum Optimal | Akses Masyarakat terhadap Air Bersih dan Sanitasi Belum Optimal | Penanganan Sampah dan LB3 Belum Optimal |



3.2. TELAHAAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA

3.2.1. TELAHAAN RENSTRA K/L

Ruang lingkup permasalahan yang akan dijelaskan pada Renstra KLHK tidak terbatas pada permasalahan LHK semata, melainkan berkenaan juga dengan tantangan serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh bidang LHK pada masa mendatang. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh KLHK adalah:

1. Permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan
2. Permasalahan yang berkenaan dengan menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional
3. Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Permasalahan yang berkenaan dengan belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka isu-isu strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024, dapat dikelompokkan kedalam 4 isu tertera pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Dari hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup didapatkan potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, sebagaimana di tampilkan pada tabel berikut.



Tabel 3. 2

Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

| No | Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang | Faktor | |
|----|--|---|---|---|--|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) ketahanan air, (2) pengelolaan sampah dan limbah B3, (3) kerusakan lingkungan, (4) kualitas udara, dan (5) keanekaragaman hayati | Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi | (1) Pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tidak berkelanjutan, (2) Belum Optimalnya pengelolaan sampah dan LB3, (3) Belum Terverifikasinya Emisi (GRK) pada sektor Limbah, (4) Tidak Terintegrasi Data Pengendalian Perubahan Iklim | (1) keterbatasan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan, (2) keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi terhadap pemantauan kualitas lingkungan hidup, (3) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Limbah B3 belum memadai, (4) Sarpras Pengelolaan Sampah di TPA | (1)Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Serta Evaluasi Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan telah Berjalan Baik, (2) Perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi terhadap SDM pemantauan kualitas lingkungan hidup, (3) Tersedianya lahan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang | Faktor | |
|----|--|---|---|--|---|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Tinggi (HCV - High Conservation Values); | | Belum Memadai, (5) Pelayanan TPS Belum Merata, (6) SDM Pengelolaan Sampah di TPA Belum Memadai, (7) Masih Rendahnya Pengurangan Timbulan Sampah, (8) tusi koordinasi capaian penurunan Emisi GRK tidak berada di Lingkungan Hidup, akan tetapi berada pada Bappelitbang | dan limbah B3 , (4) Edukasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah telah berjalan dengan baik, (5) Tersedia kebijakan Nasional dan Daerah terkait Perubahan Iklim dan semakin meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terkait perubahan iklim |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang | Faktor | |
|----|---|--|---|------------|-----------|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional, terdiri atas: (1) peningkatan HHBK, (2) jasa lingkungan, dan (3) circular Economy; | Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK; | | | |
| 3 | Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) perhutanan sosial, (2) TORA, (3) kesehatan | Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan | | | |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang | Faktor | |
|----|---|---|--|---|--|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | masyarakat, dan (4) pendidikan lingkungan; | Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat; | | | |
| 4 | Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) pemantapan kawasan hutan, (2) efektivitas tata kelola, (3) mainstreaming perubahan iklim, (4) penegakan hukum dan budaya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan LHK, dan (5) enabling conditions | Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif | 1. Rendahnya Penegakan Hukum terhadap Ketidaktaatan Pelaksanaan Regulasi Lingkungan Hidup, 2. Rendahnya Pemahaman Masyarakat dan/atau Dunia Usaha tentang Pelaksanaan Regulasi Lingkungan Hidup, 3. Kurangnya Kuantitas dan kualitas SDM | 1. Kurangnya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, 2. Belum optimalnya edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan regulasi lingkungan hidup kepada masyarakat dan/atau Dunia Usaha 3. tingginya resiko PPLH untuk | 1. tersedianya regulasi terkait penengakan hukum lingkungan hidup, 2. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan, 3. Kebijakan Penyetaraan ke jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup 4. sudah terbentuknya Ikatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang | Faktor | |
|----|--|--|---|-------------------------|--------------------|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK. | | melaksanakan tupoksinya | Indonesia (IPPLHI) |



3.2.2. TELAHAAN RENSTRA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 telah menetapkan tiga sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari.
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya, pada isu strategis yang telah ditetapkan pada urusan lingkungan hidup dan Kehutanan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan pencemaran air
2. Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah
3. Potensi bencana alam dan perubahan iklim
4. Kurangnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
5. Relativ rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Pelayanan Kesehatan.

Selanjutnya dari hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau didapatkan potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, sebagaimana di tampilkan pada tabel berikut.



Tabel 3. 3
Telaah Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau

| No | Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau | Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang | Faktor | |
|----|---|---|---|---|---|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Belum optimalnya penanganan pencemaran air | Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | (1) Pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tidak berkelanjutan (2) Tidak Terintegrasi Data Pengendalian Perubahan Iklim, (3) Perencanaan Pembangunan Daerah Belum mengacu kepada Dokumen/Kajian Lingkungan Hidup (4) Tidak Optimalnya pengelolaan RTH, (5) Belum Optimalnya pengelolaan sampah dan LB3 | (1) keterbatasan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan, (2) keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi terhadap pemantauan kualitas lingkungan hidup, (3) Belum adanya Tim Koordinasi Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Tingkat Kota, (4) Kewenangan Pengelolaan RTH tidak berada di DLH akan tetapi berada di di | (1)Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Serta Evaluasi Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan telah Berjalan Baik, (2) Perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi terhadap SDM pemantauan kualitas lingkungan hidup, (3) Tersedia kebijakan Nasional dan Daerah terkait Perubahan Iklim dan semakin meningkatnya pemahaman dan kepedulian |
| 2 | Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah | | | | |
| 3 | Potensi bencana alam dan perubahan iklim | | | | |
| 4 | Kurangnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) | | | | |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau | Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang | Faktor | |
|----|--|---|---|--|---|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Dinas Perkim, sedangkan Hutan berada di DLHK Provinsi, (5) Rendahnya Ketaatan terhadap Pemanfaatan Pola Ruang RTH, (6) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Limbah B3 belum memadai | masyarakat terkait perubahan iklim, (4) Tersedianya RDTR, (5) Tersedianya lahan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dan limbah B3 |
| 5 | Relatif rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Pelayanan Kesehatan. | | | | |
| | | Meningkatnya Pemanfaatan | | | |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau | Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang | Faktor | |
|----|---|---|---|------------|-----------|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Hutan Lestari. | | | |
| | | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | | |



3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan dan strategi di dalam pengembangan struktur ruang dan pola ruang kota, menjadi hal utama yang dibahas di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah. Dari Ranperda Penyusunan RTRW Kota Tanjungpinang diketahui bahwa kebijakan terkait pengembangan struktur ruang terdiri dari:

Kebijakan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 untuk mewujudkan Kota sebagai pusat pengembangan industri pariwisata warisan budaya dan ekonomi kreatif dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan geostrategi Kota, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan dengan jati diri kepulauan terdiri atas:

- a. Pemantapan fungsi dan peran kota sebagai ibukota Pemerintah Provinsi dan peningkatan Pusat Pelayanan Kota (PPK);
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan dan prasarana wilayah terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota;
- c. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dalam penataan ruang;
- d. Perwujudan keterpaduan antar kegiatan budidaya dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan



berdaya saing; dan

- f. Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kemudian, strategi penataan ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2042 adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk pemantapan fungsi dan peran ibukota Pemerintah Provinsi dan peningkatan Pusat Pelayanan Kota (PPK), terdiri atas:
 - a. meningkatkan keterkaitan antar SPPK di wilayah Kota dengan PPL di kawasan sekitarnya;
 - b. menjaga dan mengendalikan berfungsinya pusat kegiatan dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau secara optimal; dan
 - c. meningkatkan dan memantapkan kualitas pusat-pusat pariwisata dan sejarah budaya.
2. Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan dan prasarana wilayah terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota, terdiri atas :
 - a. meningkatkan dan memantapkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;
 - c. meningkatkan kualitas sistem jaringan sumberdaya air, mempercepat konservasi sumber air, dan meningkatkan pengendalian daya rusak air;
 - d. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana permukiman;



- e. mendorong pengembangan prasarana dan sarana pendukung bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan budaya; dan
 - f. meningkatkan cakupan pelayan penanganan sampah, dibedakan pelayanan untuk Kawasan terbangun.
3. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dalam penataan ruang, terdiri atas :
- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat;
 - b. mempertahankan fungsi kawasan lindung di wilayah Kota sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, dan sungai;
 - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - e. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - f. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan masa sekarang dan masa yang akan datang;
 - g. mengendalikan pemanfaatan kawasan pesisir; dan
 - h. menata dan mengendalikan pengembangan kawasan perumahan guna terciptanya ruang tempat tinggal yang nyaman dan manusiawi bagi masyarakat.



4. Strategi untuk perwujudan keterpaduan antar kegiatan budidaya dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terdiri atas:
 - a. menetapkan kawasan budidaya dan memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan wilayah Kota;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan yang meliputi industri pariwisata dan kemaritiman beserta prasarannya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian wilayah Kota;
 - c. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - d. mengembangkan perwujudan kota kreatif berbasis Kebudayaan dan Warisan sejarah di Kota Tanjungpinang sebagai ikon;
 - e. menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya;
 - f. mengendalikan pemanfaatan kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan;
 - g. memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya; dan
 - h. melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi.
5. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi KPBPB sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan berdaya saing, terdiri atas :
 - a. mengembangkan kegiatan ekonomi di Kota yang terkait



- dengan kegiatan ekonomi di KPBPB dan wilayah nasional lainnya;
- b. mengembangkan kawasan industri di KPBPB Dompak berorientasi promosi ekspor yang memiliki nilai tambah yang tinggi;
 - c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional, nasional, internasional di Senggarang; dan
 - d. menyediakan sarana dan prasarana yang seimbang dan dapat menunjang kegiatan ekonomi di dalam KPBPB dan diluar KPBPB di Senggarang dan Dompak dengan wilayah sekitarnya.
6. Strategi untuk peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan pemanfaatan ruang secara selektif di dalam dan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan Negara.

Di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Dokumen RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024, dilakukan identifikasi kondisi dan isu strategis lingkungan hidup serta penyusunan mitigasi, alternatif dan rekomendasi perbaikan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) RTRW Kota Tanjungpinang serta alternatif-alternatif lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan di Kota Tanjungpinang. Selanjutnya, rekomendasi KLHS RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2021 - 2041 di integrasikan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana/ atau program telah dimuat



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

dalam penyusunan RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2021 - 2041. Integrasi rekomendasi KLHS dan RTRW yang menunjukkan tindak lanjut penyempurnaan kebijakan, rencana/ atau program ditampilkan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3. 4
Integrasi KLHS dan RTRW

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|--|---|
| 1 | Jaringan Jalan Nasional | Pengembangan jaringan jalan wajib diiringi dengan pengembangan RTH | Ranperda Pasal 33 Ruang Terbuka Hijau, akan didetailkan pada RDTR |
| | | Pemetaan daerah rawan banjir dan gerakan tanah | Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg - Pengendalian Banjir berupa penataan sempadan sungai) |
| | | Penyusunan kebijakan analisis dampak lalin pada derah yang berdampak kebencanaan dan kemacetan | akan diatur lebih lanjut melalui RDTR |
| | | Perlu dilakukan rekayasa teknis di area rawan kebencanaan banjir dan gerakan tanah serta jalan dilengkapi dengan drainase dikedua sisi | Lampiran Ranperda dan Indikasi Program (Pengembangan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier) |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|---|---|
| 2 | Estuari DAM Sungai Dompok | Luas Daerah tergenang perlu dituangkan dalam peta rencana genangan dengan mempertimbangkan kajian sosial, ekonomi dan lingkungan | Merupakan Indikasi Program Jangka Menengah hingga Panjang |
| | | Penyusunan peta kawasan rawan bencana dan rekayasa teknis di area rawan kebencanaan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam rangka meminimalisir bencana | Merupakan Indikasi Program Jangka Menengah hingga Panjang |
| | | Pengelolaan lingkungan sekitar estuari DAM sebagai bentuk penjagaan kualitas sumber air baku kota | Ranperda Pasal 20 |
| | | Pengembangan RTH sekitar Muara Sungai Dompok | Merupakan Indikasi Program Jangka Menengah hingga Panjang |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|--|---|
| | | Perlunya arah dan kebijakan dari pemerintah kota untuk penyelesaian tanah terlantar, yang dapat digunakan sebagai lahan waduk/DAM non estuari baru | Merupakan Indikasi Program Jangka Menengah hingga Panjang |
| 3 | Sistem Jaringan Persampahan Kota | Pembuatan peraturan terkait TPS agar tidak berada dalam area rawan genangan banjir | Lampiran Ranperda Ketentuan Umum Zonasi Kota |
| | | Menyusun peta kawasan rawan bencana | Lampiran Ranperda Peta Struktur Ruang |
| 4 | Kawasan Industri | Pembangunan drainase di seluruh kawasan industri dengan mempertimbangkan run off area sekitar | Lampiran Indikasi Program |
| | | Khususnya industri yang berada dalam kawasan DDDT air rendah, wajib membangun kolam retensi | Lampiran Indikasi Program |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|---|--|
| | | Bufferzone atau pembatas alam/buatan antara pola ruang perdagangan dan jasa dengan mangrove eksiting | akan diatur lebih lanjut melalui RDTR |
| | | Kajian lebih lanjut pada daerah rawan kebencanaan seperti banjir, gerakan tanah, dan puting beliung | Lampiran Ranperda Ketentuan Umum Zonasi Kota |
| | | Penyusunan dokumen andalalin untuk kawasan industri akan diatur | lebih lanjut melalui RDTR |
| | | Pembuatan <i>artificial catchment</i> berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori untuk penanganan air bersih, serta pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penanganan air limbah di kawasan industri | Ranperda Pasal 33, Perda terkait bangunan gedung dan diatur lebih lanjut di RDTR |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|---|---|
| 5 | Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial | Mengurangi pemakaian air tanah berlebih khususnya kawasan fasilitas umum dan sosial pada DDDT air rendah melalui perluasan layanan perpipaan air bersih dan pemanenan air hujan (penampungan air hujan, ABSAH dan metoda lainnya) | Ranperda Pasal 22 (SPAM) dan pasal 33 (Ruang Terbuka Hijau) serta diatur lebih lanjut di RDTR dan Perda terkait bangunan Gedung |
| | | Pembuatan <i>artificial catchment</i> berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori untuk penanganan air bersih, serta pengadaan <i>septictank</i> /Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penanganan air limbah di kawasan fasum dan fasos | Ranperda Pasal 33 Ruang Terbuka Hijau |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|---|--|
| | | Peningkatan RTH dan penghijauan dengan menyediakan lahan khusus serta pengembangan konsep urban farming pada kawasan RTH | Ranperda Pasal 33 Ruang Terbuka Hijau |
| | | Pembangunan drainase di dalam kawasan fasum dan fasos dengan mempertimbangkan run off area sekitar serta penyusunan master plan | Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg -Pengembangan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier) serta RTBL untuk masterplan |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|--|--|
| | | Penyediaan sarana prasana pengendalian bencana pada daerah rawan kebencanaan seperti banjir, gerakan tanah, kebakaran dan puting beliung | Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg -Pengembangan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier). Pasal 33 terkait tempat evakuasi bencana dan Pasal 22 untuk jaringan hidran (mengikuti jalur SPAM) |
| | | Menyusun Peta Pertampalan (rawan bencana) | Lampiran Ranperda Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana |
| | | Kajian lebih lanjut pada daerah rawan kecelakaan pada fasilitas umum dan sosial terutama pada dampak lalu lintas | Akan diatur lebih lanjut dalam RDTR |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|---|---|
| 6 | Kawasan Perumahan | Mengurangi pemakaian air tanah berlebih khususnya kawasan perdagangan dan jasa melalui perluasan layanan perpipaan air bersih dan pemanenan air hujan (penampungan air hujan, ABSAH dan metoda lainnya) | Ranperda Pasal 22 (SPAM) dan pasal 33 (Ruang Terbuka Hijau) serta diatur lebih lanjut di RDTR dan Perda terkait bangunan Gedung |
| | | Peningkatan RTH dan penghijauan dengan menyediakan lahan khusus serta pengembangan konsep urban farming pada kawasan perumahan | Ranperda Pasal 33 dan pengaturan lebih lanjut pada ketentuan teknis perizinan |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|---|--|
| | | Pembuatan <i>artificial catchment</i> berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori untuk penanganan air bersih, serta pengadaan septictank/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penanganan air limbah di kawasan perumahan | Ranperda Pasal 33 Ruang Terbuka Hijau serta pengaturan lebih lanjut di mekanisme perizinan |
| | | Pembangunan drainase di dalam kawasan perumahan dengan mempertimbangkan <i>run off area</i> sekitar serta penyusunan <i>master plan</i> | Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg -Pengembangan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier) serta RTBL untuk masterplan |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|--|--|
| | | Penyediaan sarana prasana pengendalian bencana pada daerah rawan kebencanaan seperti banjir, gerakan tanah, kebakaran dan puting beliung | Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg -Pengembangan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier). Pasal 33 terkait tempat evakuasi bencana dan Pasal 22 untuk jaringan hydrant (mengikuti jalur SPAM). Sedangkan kewajiban pengelola perumahan diatur lebih lanjut dalam perizinan |
| | | Menyusun Peta Pertampalan (rawan bencana) | Lampiran Ranperda Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana |
| | | Kajian lebih lanjut pada daerah rawan kecelakaan pada kawasan perumahan terutama pada dampak lalu lintas | Akan diatur lebih lanjut dalam RDTR, dan mekanisme perizinan untuk andal lalin |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|---|---|
| 7 | Kawasan Infrastruktur Perkotaan | Upaya penanganan bencana kebakaran dan longsor melalui pembuatan SOP pengelolaan gas metan, penahan longsor alami atau buatan | Diatur lebih lanjut melalui RDTR dan perwako SOP TPA |
| | | Pengelolaan drainase sebagai bentuk pengendalian banjir | akan diatur lebih lanjut melalui RDTR |
| | | Pengelolaan air lindi dan pembuatan dokumen monitoring lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali, yang mencakup pengukuran kualitas air sekitar TPA | akan diatur lebih lanjut melalui RDTR |
| 8 | Kawasan Perdagangan dan Jasa | Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang berada pada JE air dan pangan tinggi-sangat tinggi diiringi dengan pengembangan RTH yang lebih | Ranperda Pasal 33 RTH |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|--|--|
| | | Bufferzone atau pembatas alam/buatan antara pola ruang perdagangan dan jasa dengan mangrove eksiting | Akan diatur melalui RDTR |
| | | Penyediaan sarana prasana pengendalian kebencanaan pada daerah rawankebencanaan seperti banjir, gerakan tanah,kebakaran dan puting beliung | Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg -Pengembangan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier). Pasal 33 terkait tempat evakuasi bencana dan Pasal 22 untuk jaringan hydrant (mengikuti jalur SPAM). Sedangkan kewajiban pengelola perumahan diatur lebih lanjut dalam perizinan |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|---|--|
| | | Kajian lebih lanjut pada daerah rawan kebencanaan dan kemacetan pada fasilitas umum dan sosial terutama pada dampak lalu lintas | Lampiran Ranperda Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana dan untuk kemacetan melalui mekanisme andal lalilh dalam perizinan |
| | | Mengurangi pemakaian air tanah berlebih khususnya kawasan perdagangan dan jasa melalui perluasan layanan perpipaan air bersih dan pemanenan air hujan (penampungan air hujan, ABSAH dan metoda lainnya) | Ranperda Pasal 22 SPAM dan Perda yang mengatur bangunan Gedung |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|--|---|
| | | Pembuatan <i>artificial catchment</i> berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori untuk penanganan air bersih, serta pengadaan septictank/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penanganan air limbah di kawasan perdagangan dan jasa | Ranperda Pasal 33 dan pengaturan lebih lanjut pada ketentuan teknis perizinan |
| 9 | Kawasan Perkantoran | Mengurangi pemakaian air tanah berlebih khususnya kawasan perdagangan dan jasa melalui perluasan layanan perpipaan air bersih dan pemanenan air hujan (penampungan air hujan, ABSAH dan metoda lainnya) | Ranperda Pasal 22 SPAM dan Perda yang mengatur bangunan Gedung |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|---|--|
| | | Peningkatan RTH dan penghijauan dengan menyediakan lahan khusus | Ranperda Pasal 33 |
| | | Pembuatan <i>artificial catchment</i> berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori untuk penanganan air bersih, serta pengadaan <i>septictank</i> /Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penanganan air limbah di kawasan perkantoran | Ranperda Pasal 33 Ruang Terbuka Hijau serta pengaturan lebih lanjut di mekanisme perizinan |
| | | Pembangunan drainase di dalam kawasan perkantoran dengan mempertimbangkan <i>run off</i> area sekitar serta penyusunan master plan | Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg -Pengembangan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier) serta RTBL untuk masterplan |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|--|--|
| | | Penyediaan sarana prasana pengendalian bencana pada daerah rawan kebencanaan seperti banjir, gerakan tanah, kebakaran dan puting beliung | Lampiran Ranperda (Indikasi Program : Keg -Pengembangan jaringan drainase mikro berupa drainase primer, sekunder, dan tersier). Pasal 33 terkait tempat evakuasi bencana dan Pasal 22 untuk jaringan hydrant (mengikuti jalur SPAM). Sedangkan kewajiban pengelola perkantoran diatur lebih lanjut dalam perizinan |
| | | kajian lebih lanjut pada daerah rawan kebencanaan dan rawan kemacetan | Lampiran Ranperda Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana, sedangkan untuk kemacetan melalui mekanisme andal lalin |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No. | Kebijakan, Rencana, dan/atau Program | Rekomendasi | Integrasi |
|-----|---|---|---|
| | | Penyediaan jaringan hydrant tersendiri pada setiap perkantoran untuk pengendalian kebakaran serta pengembangan jaringan hydrant air | Diatur lebih lanjut melalui mekanisme perizinan |



3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Tahun 2021-2026, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, maka didapat bahwa isu strategis yang dihadapi di Kota Tanjungpinang pada tabel dibawah ini .

Selain itu, Isu strategis yang ditetapkan pada Rensta ini merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.



Tabel 3. 5
Isu Strategis Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

| No | Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau | Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026 | Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah | Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 2024-2026 |
|----|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) ketahanan air, (2) pengelolaan sampah dan limbah B3, (3) kerusakan lingkungan, (4) kualitas udara, dan (5) keanekaragaman hayati | Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Inklusif, dan Berkelanjutan | Rendahnya Kualitas Tutupan Lahan | Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan, terdiri atas: (1) Pencemaran Air, (2) Pengelolaan sampah dan Limbah B3, (3) kerusakan lingkungan akibat perubahan tutupan lahan dan alih fungsi |



**RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026**

| No | Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau | Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026 | Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah | Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 2024-2026 |
|-----------|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | lahan (4) kualitas udara dan emisi GRK |
| | Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional, terdiri atas: (1) peningkatan HHBK, (2) jasa lingkungan, dan (3) circular Economy; | Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari. | | Rendahnya Kondisi Kualitas Air | Isu tata kelola dan kelembagaan terdiri dari : (1) penegakan hukum atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, (2) Pengelolaan |



**RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026**

| No | Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau | Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026 | Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah | Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 2024-2026 |
|-----------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | laboratorium lingkungan, (3). Layanan perizinan Lingkungan Hidup |
| | Isu sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) perhutanan sosial, (2) TORA, (3) kesehatan masyarakat, dan (4) pendidikan lingkungan; | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | | Kualitas Udara Belum Optimal | |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau | Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026 | Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah | Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 2024-2026 |
|----|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup terdiri atas: (1) pemantapan kawasan hutan, (2) efektivitas tata kelola, (3) mainstreaming perubahan iklim, (4) penegakan hukum dan budaya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan LHK, dan (5) enabling conditions | | | Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Regulasi Lingkungan Hidup Belum Optimal | |
| | | | | Akses Masyarakat terhadap Air Bersih dan Sanitasi Belum Optimal | |



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM dan RKPD; bahwa definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan operasional dinas dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific*, *measureable*,



achievable, relevant, time bond, dan continuously improve (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026. Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang selama 3 (tiga) tahun adalah **“Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan
2. Meningkatnya Jumlah Sampah Terkelola

Pertama, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan indikator tujuan dan sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan rumusan sbb:

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Penjelasan :

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL = Indeks Kualitas Lahan

Kedua, Meningkatnya Jumlah Sampah Terkelola dengan indikator Persentase sampah terkelola dengan rumusan

% sampah terkelola

$$= \frac{\text{Berat Pengurangan sampah} + \text{Berat penanganan Sampah}}{\text{Berat Timbunan Sampah}} \times 100\%$$

Penjelasan lebih lanjut terkait Target Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-n ditampilkan pada tabel berikut.



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja Indiakator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke- | | |
|----|--|---|-----------------------------|---|--------|-------------------------------------|-------|-------------------------|--|-------|------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan | IKLH | 0.376 IKA + 0.405 IKU + 0.219 IKL | Indeks | 63.22 | 61.61 | 62.65 | 63.10 | 63.55 | 64 |
| | | Meningkatnya Jumlah Sampah Terkelola | Persentase Sampah Terkelola | Berat pengurangan + berat penanganan / timbulan *100% | % | 79.68 | 78.27 | 100 | 100 | 100 | 100 |



4.2. HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPD

Tujuan pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera. Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tanjungpinang.
2. Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing. Indikator keberhasilannya adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Tanjungpinang.
3. Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan. Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
4. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif). Indikator pengukur keberhasilannya adalah semakin meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Berangkat dari tujuan di atas, dirumuskan sasaran pembangunan Kota Tanjungpinang periode tahun 2024-2026. Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran dari implementasi tujuan 1, Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
3. Meningkatnya Pembangunan Gender
4. Terwujudnya Ketahanan Pangan



Sasaran dari implementasi tujuan 2, Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
2. Terkendalinya Laju Inflasi
3. Menurunnya Tingkat Pengangguran
4. Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran dari implementasi tujuan 3, Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan adalah:

1. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
3. Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sasaran dari implementasi tujuan 4, Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif) adalah:

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Daya Saing Daerah

Dari penjelasan Tujuan dan Sasaran RPD di atas, terdapat keterkaitan yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup yaitu Tujuan 3, Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan Sasaran dari tujuan 3 yaitu :

1. meningkatnya infrastruktur wilayah yang berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim
2. Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang akan dicapai, perlu dipilih strategi yang tepat, dimana strategi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perumusan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan maupun petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan tersebut.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam tiga tahun memiliki 2 (dua) arah kebijakan yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan sampah. Strategi yang disusun untuk mewujudkan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, Peningkatan ketahanan iklim, serta Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya, arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan sampah



memiliki strategi Pencegahan dan Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan memaksimal Pengelolaan sampah, Peningkatan ketahanan iklim melalui implementasi teknologi rendah emisi pada sektor persampahan, Peningkatan Peran serta masyarakat Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Persampahan dan Kebersihan, serta Penguatan kelembagaan melalui peningkatan SDM dan penguatan Regulasi di Bidang Persampahan. Untuk lebih jelas, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam tiga tahun ditampilkan dalam tabel berikut.



Tabel 5. 1
RUMUSAN PERNYATAAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM TIGA TAHUN

| Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 : | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Tujuan | Sasaran | Arah Kebijakan | Strategi |
| Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) Perencanaan Lingkungan Hidup; (2) pemantauan kualitas udara, air, dan Lahan; (3) Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan; (4) Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup; (5) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup |
| | | | Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan (1) Pemberian informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 : | | | |
|--|---------|--------------|--|
| Tujuan | Sasaran | Arah Kebikan | Strategi |
| | | | Lingkungan Hidup pada Masyarakat dan (2) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | | | Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan merehabilitasi lingkungan hidup yang tercemar atau rusak |
| | | | Peningkatan ketahanan iklim melalui (1) penyadartahuan masyarakat, (2) peningkatan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, (3) penyediaan data dan informasi. (4) implementasi teknologi rendah emisi pada sektor persampahan |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 : | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|
| Tujuan | Sasaran | Arah Kebikan | Strategi |
| | | | Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang lingkungan hidup (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, (3) Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus lingkungan hidup, dan (4) peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup |
| | Meningkatnya Jumlah Sampah Terkelola | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah | Pencengahan dan Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan memaksimalkan Pengelolaan sampah |
| | | | Peningkatan ketahanan iklim melalui implementasi teknologi rendah emisi pada sektor persampahan |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 : | | | |
|--|---------|--------------|--|
| Tujuan | Sasaran | Arah Kebikan | Strategi |
| | | | Peningkatan Peran serta masyarakat Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan |
| | | | Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Retribusi Persampahan dan Kebersihan |
| | | | Penguatan kelembagaan melalui peningkatan SDM dan penguatan Regulasi di Bidang Persampahan |



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 2024-2026, memperhatikan: (1) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2026; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah dalam Renstra Dinas Lingkungan hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4) Kebijakan nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku. Dokumen Renstra ini memuat perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun ke depan yang lebih lanjut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim



- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
- 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat



- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan



- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Alat Besar
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



Tabel 6. 1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan 2023 | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--|---|-----------------|---|---|--|------------|-------------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan | 2.11.02.0.00.00 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan LH yang disusun | (Realisasi dokumen yang disusun : Jumlah dokumen harus disusun pada tahun ke n) x 100% | Persentase | 50 | NA | 100 | 100 | 200,000,000 | 100 | 210,000,000 | 100 | 220,000,000 | 100 | 630,000,000 | DLH |
| | | 2.11.02.0.00.00 | Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | RPPLH dan D3TLH Kota yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah | Dokumen | NA | NA | NA | 1 | 40,000,000 | 1 | 48,000,000 | 1 | 220,000,000 | 1 | 308,000,000 | |
| | | 2.11.02.2.01.02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | Dokumen | NA | NA | NA | 1 | 40,000,000 | 1 | 48,000,000 | 1 | 220,000,000 | 1 | 308,000,000 | |
| | | 2.11.02.0.00.00 | Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Terlaksananya dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya | Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya | Dokumen | 2 | NA | 1 | 1 | 160,000,000 | 1 | 162,000,000 | NA | - | 2 | 322000000 | |
| | | 2.11.02.2.02.01 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | 1 | NA | NA | 0 | - | 1 | 162,000,000 | NA | - | 1 | 162,000,000 | |



RENSTRADINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|-----------------|--|--|---|---|---------|-------------------------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | Target 11 | Rp 12 | Target 13 | Rp 14 | Target 15 | Rp 16 | Target 17 | |
| | | 2.11.02.2.02.02 | | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD | Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | Dokumen | 1 | NA | 1 | 1 | 160,000,000 | NA | - | NA | - | 1 | 160,000,000 | |
| | | 2.11.03.00.00 | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | Meningkatnya Indeks Kualitas Air | Nilai IKA | Poin | 50 | 51.11 | 51.16 | 51.21 | 1,500,000,000 | 51.26 | 1,600,000,000 | 51.31 | 1,700,000,000 | 51.31 | 4,800,000,000 | DLH |
| | | | | | Meningkatnya Indeks Kualitas Udara | Nilai IKU | Poin | 90.36 | 85.28 | 87.74 | 88.74 | | 89.74 | | 90.74 | | | | |
| | | | | Meningkatnyan Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Nilai IKTL | Poin | 35.74 | 35.86 | 35.98 | 36.1 | 36.22 | | 36.36 | | 36.36 | | | | |
| | | | | Persentase Laporan/dokumen penendalian perubahan iklim | (Realisasi dokumen atau laporan yang disusun : Jumlah dokumen atau laporan yang harus disusun pada tahun ke n) x 100% | Persentase | 50 | 100 | 67 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | |
| | | | | Tersedianya dokumen/laporan informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat | Persentase dokumen/laporan informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | |
| | | 2.11.03.201.00 | | Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Tersedianya data indeks kualitas Udara | Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara | Lokasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 700,000,000 | 4 | 770,000,000 | 4 | 840,000,000 | 4 | 2,310,000,000 | DLH |
| | | | | Tersedianya data indeks kualitas air | Jumlah lokasi pemantauan kualitas air sungai dan danau secara manual | Lokasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | | |



| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab | |
|--------|---------|-----------------|---|--|---|--|----------|-------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|---|---------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Target 11 | | Rp 12 |
| | | | | | Tersedianya data Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Terlaksananya pemantauan dan pendataan Tutupan Lahan | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | | Meningkatnya pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak | Jumlah Kampung Iklim di Kota Tanjungpinang yang teregistrasi secara nasional | Jumlah | 24 | 32 | 35 | 39 | 39 | | 42 | | 42 | | | | | |
| | | | | Tersedianya Instrument Parameter Kualitas Air | Parameter Uji Kualitas air yang tersedia | Parameter | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | | | |
| | | | | Tersedianya data kendaraan yang memenuhi baku mutu emisi | Jumlah kendaraan roda 4 yang diuji | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1100 | | 1200 | | 1200 | | | | | |
| | | 2.11.03.2.01.01 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Dokumen | 0 | 1 | 1 | 2 | 350,000,000 | 2 | 385,000,000 | 2 | 420,000,000 | 2 | 1,155,000,000 | | |
| | | 2.11.03.2.01.02 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | 1 | 2 | 2 | 2 | 250,000,000 | 2 | 275.000,000 | 2 | 300,000,000 | 2 | 825,000,000 | | |



RENSTRADINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|-----------------|---|---|--|--|------------|-------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|---------|--------------|---------|-------------|---|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2.11.03.2.01.03 | | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 22 | 100,000,000 | 20 | 110,,000,000 | 19 | 120,000,000 | 19 | 330,000,000 | |
| | | 2.11.03.2.02.00 | | Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Persentase | NA | NA | 100 | 100 | 300,000,000 | 100 | 330,000,000 | 100 | 360,000,000 | 100 | 990,000,000 | |
| | | 2.11.03.2.02.01 | | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | Laporan | 1 | 1 | 2 | 1 | 100,000,000 | 1 | 110,000,000 | 1 | 120,000,000 | 1 | 330,000,000 | |
| | | 2.11.03.2.02.03 | | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | Titik | 0 | 27 | 10 | 42 | 200,000,000 | 44 | 220,000,000 | 46 | 240,000,000 | 46 | 660,000,000 | |
| | | 2.11.03.2.03.00 | | Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Terpulihkannya media lingkungan yang tercemar/rusak | Luasan kawasan yang difasilitasi pemulihannya | Ha | NA | NA | NA | 1445600 | 500,000,000 | 1445600 | 500,000,000 | 1445600 | 500,000,000 | 1445600 | 1,500,000,000 | |
| | | 2.11.03.2.03.01 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | Dokumen | NA | NA | NA | 2 | 300,000,000 | 2 | 300,000,000 | 2 | 300,000,000 | 2 | 900,000,000 | |



| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|-----------------|--|--|--|--|------------|-------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|---|---------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2.11.03.2.03.04 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Dokumen | NA | NA | Na | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | | 600,000,000 | |
| | | 2.11.04.0.00.00 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI) | | Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang di rencanakan dikali 100% | Persen | NA | NA | NA | 15 | 500,000,000 | 20 | 550,000,000 | 25 | 600,000,000 | 25 | 1,650,000,000 | DLH |
| | | 2.11.04.2.01.00 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Persen | NA | NA | NA | 1 | 500,000,000 | 1 | 550,000,000 | 1 | 600,000,000 | 1 | 1,650,000,000 | |
| | | 2.11.04.2.01.04 | | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Ha | NA | NA | NA | 15 | 250,000,000 | 20 | 275,000,000 | 25 | 300,000,000 | 25 | 825,000,000 | |
| | | 2.11.04.2.01.07 | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | Unit | NA | NA | NA | 1 | 250,000,000 | 1 | 275,000,000 | 1 | 300,000,000 | 1 | 825,000,000 | |
| | | 2.11.05.0.00.00 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | Meningkatnya persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan | Persentase | 45 | 50 | 60 | 65 | 50,000,000 | 75 | 60,000,000 | 85 | 70,000,000 | 85 | 180,000,000 | DLH |



RENSTRADINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|-----------------|---|--|--|---|----------------|-------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2.11.05.2.01.00 | | Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 serta pengumpul Limbah B3 | usaha/kegiatan | 8 | 10 | 13 | 15 | 50,000,000 | 17 | 60,000,000 | 20 | 70,000,000 | 20 | 180,000,000 | |
| | | 2.11.05.2.01.02 | | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | Laporan | 8 | 10 | 13 | 15 | 50,000,000 | 17 | 60,000,000 | 20 | 70,000,000 | 20 | 180,000,000 | |
| | | 2.11.06.0.00.00 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang memperoleh pembinaan dan pengawasan | Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dikali 100% | Persen | 0 | 0 | 20 | 25 | 200,000,000 | 30 | 210,000,000 | 35 | 220,000,000 | 35 | 630,000,000 | DLH |



RENSTRADINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|-----------------|--|---|--|---|----------------|-------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2.11.06.2.01.00 | | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK | Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK | usaha/kegiatan | 31 | 32 | 55 | 64 | 200,000,000 | 73 | 210,000,000 | 82 | 220,000,000 | 82 | 630,000,000 | |
| | | 2.11.06.2.01.01 | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | Dokumen | 0 | 0 | 20 | 24 | 50,000,000 | 28 | 55,000,000 | 32 | 60,000,000 | 32 | 165,000,000 | |
| | | 2.11.06.2.01.03 | | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | 31 | 32 | 35 | 40 | 150,000,000 | 45 | 155,000,000 | 50 | 160,000,000 | 50 | 465,000,000 | |
| | | 2.11.08.0.00.00 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | Terlaksananya program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota | Jumlah | NA | NA | NA | 2 | 200,000,000 | 3 | 220,000,000 | 5 | 240,000,000 | 5 | 660,000,000 | DLH |



RENSTRADINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|-----------------|--|---|--|-------------|-------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|----|--------------|----|-------------|---|-------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2.11.08.2.01.00 | Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksanannya kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlaksanannya kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persen | NA | NA | NA | 50 | 200,000,000 | 60 | 2200,000,000 | 70 | 140,000,000 | 70 | 660,000,000 | |
| | | 2.11.08.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | Lembaga | NA | NA | NA | 5 | 50,000,000 | 10 | 55,000,000 | 15 | 60,000,000 | 15 | 165,000,000 | |
| | | 2.11.08.2.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Dokumen | NA | NA | NA | 1 | 50,000,000 | 1 | 55,000,000 | 1 | 60,000,000 | 1 | 165,000,000 | |
| | | 2.11.08.2.01.03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | Orang | NA | NA | NA | 15 | 100,000,000 | 20 | 110,000,000 | 25 | 120,000,000 | 25 | 330,000,000 | |
| | | 2.11.09.0.00.00 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase sekolah adiwiyata tingkat Kota | Jumlah sekolah adiwiyata di tingkat kabupaten dibagi jumlah sekolah yang mengajukan adiwiyata tingkat kabupaten dikali 100 | Persen | NA | NA | 45 | 50 | 150,000,000 | 55 | 200,000,000 | 60 | 250,000,000 | 60 | 600,000,000 | DLH |
| | | 2.11.09.2.01.00 | Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penghargaan lingkungan hidup yang diberikan ke masyarakat | Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan ke Masyarakat | Penghargaan | NA | NA | 1 | 1 | 150,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 250,000,000 | 1 | 600,000,000 | |



RENSTRADINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|-----------------|---|---|---|--|------------|-------------------------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2.11.09.2.01.01 | | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Entitas | 0 | 0 | 15 | 20 | 150,000,000 | 20 | 200,000,000 | 25 | 250,000,000 | 25 | 600,000,000 | |
| | | 2.11.10.0.00.00 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani | Pengaduan masyarakat yang ditangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali 100% | Persen | 80 | 90 | 100 | 100 | 50,000,000 | 100 | 60,000,000 | 100 | 70,000,000 | 100 | 180,000,000 | DLH |
| | | 2.11.10.2.01.01 | | Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan | Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan | Jumlah | 4 | 10 | 10 | 10 | 50,000,000 | 10 | 60,000,000 | 10 | 70,000,000 | 10 | 180,000,000 | |
| | | | | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000,000 | 1 | 60,000,000 | 1 | 70,000,000 | 1 | 180,000,000 | |
| | | 2.11.11.0.00.00 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | Persentase Pengurangan Sampah | (Total Volume sampah yang dapat dikurangi/total volume timbunan sampah)*100% | Persentase | 21.34 | 21.89 | 27 | 28 | 8,000,000,000 | 30 | 8,000,000,000 | 30 | 8,000,000,000 | 30 | 24,000,000,000 | DLH |



RENSTRADINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|-----------------|---|---|---|---|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Persentase Penanganan Sampah | (Total Volume sampah yang dapat ditangani/total volume timbulan sampah)*100% | Persentase | 58.34 | 56.38 | 73 | 72 | | 70 | | 70 | | 70 | | |
| | | 2.11.11.2.01.00 | | Kegiatan Pengelolaan Sampah | Meningkatnya Jumlah Penanganan Sampah | Jumlah Penanganan Sampah | Ton | 32,302.50 | 32,083.50 | 51,075.29 | 51,625.06 | 7,900,000,000 | 52,170.39 | 7,900,000,000 | 51,170.39 | 7,900,000,000 | 51,170.39 | 23,700,000,000 | |
| | | | | Meningkatnya Jumlah Pengurangan Sampah | Jumlah Pengurangan Sampah | Ton | 11,812.74 | 12,455.23 | 19,153.23 | 20,359.18 | 22,358.74 | | 21,358.74 | | 21,358.74 | | | | |
| | | | | Meningkatnya Jumlah Bank Sampah | Jumlah Peningkatan Jumlah Bank Sampah Pada Tahun n | Unit | 24 | 15 | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | | | |
| | | | | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan | Dokumen | NA | NA | 1 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 600,000,000 | |
| | | | | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Laporan | NA | NA | NA | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 600,000,000 | |
| | | | | Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Ton | 32,302.50 | 32,083.50 | 31,700.00 | 31,500.00 | 1,500,000,000 | 31,200.00 | 1,500,000,000 | 31,000.00 | 1,500,000,000 | 31000 | 4,500,000,000 | |



RENSTRADINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|-----------------|---|--|--|---|----------|-------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|----|---------------|----|---------------|---|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | Kelompok | 46 | 57 | 65 | 75 | 850,000,000 | 85 | 850,000,000 | 95 | 850,000,000 | 95 | 2,550,000,000 | |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Dokumen | 0 | 0 | 1 | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | 1 | 450,000,000 | |
| | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | Unit | 0 | 0 | 50 | 50 | 5,000,000,000 | 50 | 5,000,000,000 | 50 | 5,000,000,000 | 1 | 15,000,000,000 | |
| | | 2.11.11.2.01.00 | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh swasta/ Jumlah pengelolaan Sampah yang terdata dikali 100% | Persen | NA | NA | NA | 50 | 100,000,000 | 60 | 100,000,000 | 80 | 100,000,000 | 80 | 300,000,000 | |
| | | | | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | Laporan | NA | NA | NA | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | 300,000,000 | |



RENSTRADINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|----------------|---|--|---|-------------|-------------------------------------|-------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|-----|----------------|-------|----------------|---|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2.11.01.00.00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP DLH | Persen | NA | NA | 0 | 0.2 | 18,918,086,415 | 0.2 | 18,918,086,415 | 0.2 | 18,918,086,415 | 0.2 | 41,036,595,715 | DLH |
| | | | | Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah | Nilai Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | | |
| | | 2.11.01.201.00 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Terselenggaranya layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan DLH yang efektif | Jumlah Dokumen Rancangan | Dokumen | 1 | 1 | 2 | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | 300,000,000 | |
| | | | | | Nilai LKIP DLH | POIN | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.39 | | | | 73.54 | | | | |
| | | 2.11.01.201.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 2 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 150,000,000 | |
| | | 2.11.01.201.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 150,000,000 | |
| | | 2.11.01.202.00 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tertibnya Pengelolaan Keuangan DLH | Tingkat Kinerja Pengelolaan Keuangan DLH | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,509,831,765 | 100 | 7,509,831,765 | 100 | 7,509,831,765 | 100 | 22,529,495,295 | |
| | | 2.11.01.202.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 48 | 58 | 58 | 58 | 7,509,831,765 | 58 | 7,509,831,765 | 58 | 7,509,831,765 | 58 | 22,529,495,295 | |
| | | 2.11.01.205.00 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terselenggaranya Reformasi Birokrasi, Manajemen SDM dan Tata Organisasi yang prima | Nilai RB | Poin | NA | NA | B | B | 420,000,000 | B | 420,000,000 | B | 420,000,000 | B | 1,260,000,000 | |
| | | 2.11.01.205.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | NA | NA | 1 | 3 | 200,000,000 | 3 | 200,000,000 | 3 | 200,000,000 | 3 | 600,000,000 | |



| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab | |
|--------|---------|-----------------|---|--|--|---|------------|-------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---|---------------|-----------------------------|----|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | | Rp |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 2.11.01.2.05.09 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | NA | NA | 5 | 10 | 100,000,000 | 15 | 150,000,000 | 20 | 210,000,000 | 20 | 410,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.05.11 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | NA | NA | 30 | 30 | 120,000,000 | 30 | 150,000,000 | NA | - | 30 | 240,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.06.00 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Adminitrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor sesuai standar dan Administrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu dibanding jumlah pemenuhan sarana prasarana kantor dan administrasi layanan kepegawaian dikali 100 | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,150,000,000 | 100 | 1,150,000,000 | 100 | 1,150,000,000 | 100 | 3,450,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.06.01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 150,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.06.02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | | 8 | NA | 10 | 300,000,000 | 10 | 300,000,000 | 10 | 300,000,000 | 10 | 900,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.06.03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | | 4 | 4 | 4 | 50,000,000 | 4 | 50,000,000 | 4 | 50,000,000 | 4 | 150,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.06.04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | | 4 | 4 | 4 | 200,000,000 | 4 | 200,000,000 | 4 | 200,000,000 | 4 | 600,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.06.05 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | | 1 | 2 | 2 | 150,000,000 | 2 | 150,000,000 | 2 | 150,000,000 | 2 | 450,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.06.06 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | NA | NA | NA | 5 | 50,000,000 | 8 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 10 | 150,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.06.07 | | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | NA | NA | 1 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 150,000,000 | | |



RENSTRADINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|-----------------|---|---|---|-------------------|--------|-------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---|--------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2.11.01.2.06.09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 300,000,000 | 12 | 300,000,000 | 12 | 300,000,000 | 12 | 600,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.07.00 | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 750,000,000 | 100 | 750,000,000 | 100 | 750,000,000 | 100 | 2,250,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.07.01 | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | NA | NA | Na | 0 | - | 0 | - | 1 | 150,000,000 | 1 | 150,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.07.02 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | NA | NA | NA | 1 | 300,000,000 | 5 | 250,000,000 | 5 | 250,000,000 | 5 | 800,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.07.03 | | Pengadaan Alat Besar | Tersedianya Alat Besar | Unit | NA | NA | NA | 0 | - | 1 | 250,000,000 | 0 | - | 0 | 250,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.07.05 | | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | Unit | NA | NA | 15 | 20 | 100,000,000 | 0 | - | 20 | 100,000,000 | 20 | 200,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.07.06 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | NA | NA | NA | 10 | 150,000,000 | 10 | 150,000,000 | 10 | 50,000,000 | 10 | 350,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.07.07 | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | Unit | NA | 1 | NA | 2 | 200,000,000 | 0 | - | 5 | 200,000,000 | 5 | 400,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.07.08 | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Tersedianya Aset Tak Berwujud | Unit | NA | NA | 1 | 0 | - | 1 | 100,000,000 | 0 | - | 0 | 100,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.08.00 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 7,263,254,650 | 100 | 7,263,254,650 | 100 | 7,263,254,650 | 100 | 21,789,763,950 | | |
| | | 2.11.01.2.08.01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | NA | Na | Na | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 150,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.08.02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 200,000,000 | 12 | 200,000,000 | 12 | 200,000,000 | 12 | 600,000,000 | | |



RENSTRADINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--------|---------|-----------------|---|--|---|-------------------|--------|-------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---|--------|-----------------------------|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | | 2023 | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2.11.01.2.08.04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 7,013,254,650 | 12 | 7,013,254,650 | 12 | 7,013,254,650 | 12 | 21,039,763,950 | | |
| | | 2.11.01.2.09.00 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,725,000,000 | 100 | 1,725,000,000 | 100 | 1,725,000,000 | 100 | 5,175,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.09.01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 300,000,000 | 2 | 300,000,000 | 2 | 300,000,000 | 2 | 900,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.09.02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | 6 | 6 | 6 | 7 | 500,000,000 | 12 | 500,000,000 | 17 | 500,000,000 | 17 | 1,500,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.09.05 | | Pemeliharaan Mebel | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Unit | NA | NA | NA | 10 | 100,000,000 | 10 | 100,000,000 | 10 | 100,000,000 | 10 | 300,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.09.06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | NA | NA | 50 | 50 | 150,000,000 | 50 | 150,000,000 | 50 | 150,000,000 | 50 | 450,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.09.07 | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Unit | NA | 41 | NA | 10 | 200,000,000 | 10 | 200,000,000 | 10 | 200,000,000 | 10 | 600,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.09.08 | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Unit | NA | NA | NA | 1 | 75,000,000 | 1 | 75,000,000 | 1 | 75,000,000 | 1 | 225,000,000 | | |
| | | 2.11.01.2.09.09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Unit | NA | NA | NA | 2 | 400,000,000 | 2 | 400,000,000 | 2 | 400,000,000 | 2 | 1,200,000,000 | | |



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan digambarkan melalui indikator tujuan dan indikator sasaran.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung merefleksikan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

.



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| No | Indikator | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |
|----|--|--|------------|-------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------|-------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Persentase dokumen perencanaan LH yang disusun | (Realisasi dokumen yang disusun : Jumlah dokumen harus disusun pada tahun ke n) x 100% | Persentase | 50 | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Meningkatnya Indeks Kualitas Air | Nilai IKA | Poin | 50 | 51.11 | 51.16 | 51.21 | 51.26 | 51.31 | 51.31 |
| 3 | Meningkatnya Indeks Kualitas Udara | Nilai IKU | Poin | 90.36 | 85.28 | 87.74 | 88.74 | 89.74 | 90.74 | 90.74 |
| 4 | Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Nilai IKTL | Poin | 35.74 | 35.86 | 35.98 | 36.1 | 36.22 | 36.36 | 36.36 |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Indikator | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |
|----|--|---|------------|-------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------|------|------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Persentase Laporan/dokumen penendalian perubahan iklim | (Realisasi dokumen atau laporan yang disusun : Jumlah dokumen atau laporan yang harus disusun pada tahun ke n) x 100% | Persentase | 50 | 100 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Tersedianya dokumen/laporan informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat | Persentase dokumen/laporan informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Indikator | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |
|----|--|--|------------|-------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------|------|------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dibagi Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang di rencanakan dikali 100% | Persentase | NA | NA | NA | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 8 | Meningkatnya persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan | Persentase | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 85 |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Indikator | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |
|----|--|---|--------|-------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------|------|------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang memperoleh pembinaan dan pengawasan | Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dikali 100% | Persen | 0 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Indikator | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |
|----|--|--|--------|-------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------|------|------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Terlaksananya program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat | Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota | Jumlah | NA | NA | 45 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 11 | Persentase sekolah adiwiyata tingkat Kota | Jumlah sekolah adiwiyata di tingkat kabupaten dibagi jumlah sekolah yang mengajukan adiwiyata tingkat kabupaten dikali 100 | Persen | NA | NA | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Indikator | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |
|----|---|--|--------|-------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------|------|------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani | Pengaduan masyarakat yang ditangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali 100% | Persen | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Indikator | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |
|----|-------------------------------|--|------------|-------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------|------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Persentase Pengurangan Sampah | (Total Volume sampah yang dapat dikurangi/total volume timbunan sampah)*100% | Persentase | 21.34 | 21.89 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | Persentase Penanganan Sampah | (Total Volume sampah yang dapat ditangani/total volume timbunan sampah)*100% | Persentase | 58.34 | 56.38 | 73 | 72 | 70 | 70 | 70 |



RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026

| No | Indikator | Formula Indikator | Satuan | Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Proyeksi Tahun Berjalan | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |
|----|---|---|--------|-------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------|------|------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP DLH | Persen | NA | NA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 16 | Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah | Nilai Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



BAB VIII

PENUTUP

Renstra atau Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan urusan lingkungan hidup dan persampahan, yang berisi isu-isu/program-program strategis yang akan diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Selain itu, ditetapkan pula cara pencapaian dan Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan urusan lingkungan hidup dan persampahan Kota Tanjungpinang periode Tahun 2024 hingga Tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan tiga tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
2. Renstra Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup dan persampahan selama tiga tahun di Kota Tanjungpinang. Renstra akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan (RKT) yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).



3. Renstra harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidak sesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidak patuhan bahkan pelanggaran.
4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility* (CSR), dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/Renja serta konsistensinya dengan RPD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Renstra DLH Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

Dengan disusunnya dokumen ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait yang akan mengambil bagian untuk berpartisipasi aktif di dalam proses pembangunan Kota Bandung khususnya terkait urusan lingkungan hidup dan persampahan.